



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 55 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 149 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN KABUPATEN NGAWI TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk penyederhanaan Birokrasi, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 yang berdampak pada hasil revaluasi kinerja Perangkat Daerah, penyesuaian struktur organisasi Perangkat Daerah, serta penyesuaian kegiatan/subkegiatan beserta indikator kinerja dan targetnya, maka Peraturan Bupati Ngawi Nomor 149 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 75 Tahun 2022 masih memerlukan penyesuaian sehingga perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Ngawi Nomor 149 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6081);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
24. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
25. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

26. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
27. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
36. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
37. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
38. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 02 Seri D);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 10);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 19);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 274);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 275);

44. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 277);
45. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 149 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 75 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 75);
46. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR 149 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN NGAWI TAHUN 2021-2026.

Pasal I

Lampiran Peraturan Bupati Ngawi Nomor 149 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 75 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 75) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 14 Juli 2023

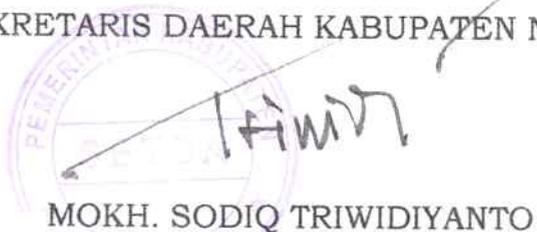
BUPATI NGAWI,



ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 14 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,



MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2023 NOMOR 55

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR ~~55~~ TAHUN 2021
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI NGAWI NOMOR 149
TAHUN 2021 TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH PADA DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA STATISTIK DAN
PERSANDIAN KABUPATEN NGAWI TAHUN
2021-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kegiatan perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dimana pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu dokumen rencana pembangunan yang harus disusun oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah.

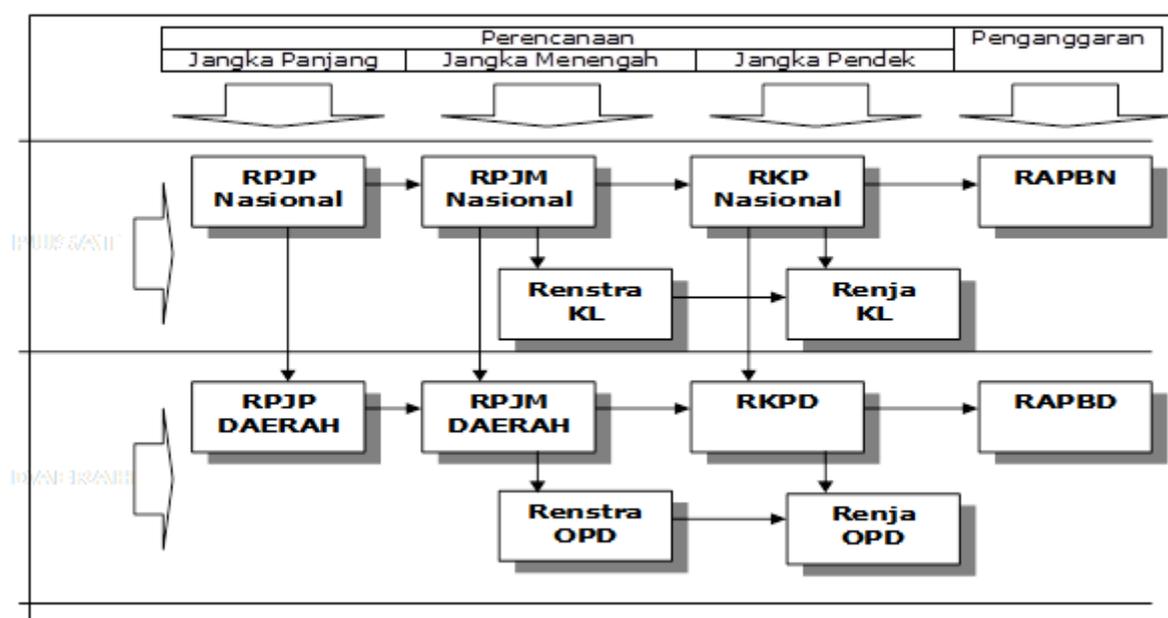
Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk memberi arah tujuan dan sasaran organisasi yang akan dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Perencanaan strategis adalah awal dari akuntabilitas suatu lembaga kepada pihak-pihak

yang berkepentingan oleh karena itu penyusunan rencana strategis memerlukan keterlibatan dari berbagai pihak yang berkepentingan.

Perubahan Kedua Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi Tahun 2021 - 2026 adalah dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian yaitu membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang komunikasi informatika, statistik dan persandian (sesuai dengan pasal 3 Peraturan Bupati Ngawi Nomor 17 Tahun 2022) yang ada dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi. Proses penyusunan Penyusunan Perubahan Kedua Rencana Strategis dimulai dengan Surat Edaran Bupati Nomor: 000.7.2.4/13/404.401/2023 Tanggal 01 Agustus 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Kedua Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 dan ditindaklanjuti dengan pembentukan tim penyusunan Perubahan Rencana Strategis yang selanjutnya menyusun rancangan perubahan rencana strategis berdasarkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah dan berpedoman pada rancangan awal RPJMD Kabupaten Ngawi Tahun 2021 - 2026 yang telah disempurnakan berdasarkan hasil konsultasi publik RPJMD dan Kesepakatan bersama DPRD dan selanjutnya akan diverifikasi oleh Bappeda untuk menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi kebijakan, program dan kegiatan untuk diajukan kepada Bupati untuk memperoleh pengesahan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Tahapan penyusunan perubahan kedua Renstra Perangkat Daerah berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan Renstra perangkat Daerah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu meliputi: (1) persiapan penyusunan; (2) penyusunan Rancangan Awal; (3) penyusunan Rancangan; (4) penyusunan Rancangan Akhir; dan (5) penetapan Renstra Perangkat Daerah. Berdasarkan hal dan pertimbangan di atas Perubahan kedua Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi Tahun 2019-2024 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Renstra sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Ngawi Nomor 149 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 dan akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi. Keterkaitan renstra dengan RPJMD, Renstra K/L, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi dan Renja dijelaskan dengan diagram alir sebagai berikut ;



1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Perubahan kedua Rencana Strategis ini berpedoman pada :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2015;
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
7. Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Yang Menegaskan Bahwa Pemberdayaan Perempuan menjadi urusan wajib didaerah ;
8. Inpres No 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan nasional ;
9. Permendagri No 15 tahun 2018 Tentang Pedoman PUG di Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaga Negara Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4566);
16. Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembanginan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintahahn daerah mengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
20. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, ditindaklanjuti dengan Perubahan Pohon Kinerja Perangkat Daerah hasil asistensi oleh Kementerian PAN-RB yang mempengaruhi Perubahan Kegiatan / Sub Kegiatan beserta indikator kinerja dan targetnya pada Renstra – PD;
21. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi yang menyebabkan tidak diberlakukannya Jabatan Fungsional Tertentu menjadi sub koordinator;

22. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi Dan Informatika ;
23. Peraturan Kepala Badan Statistik Nomor 9 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 8 tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Persandian;
25. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 19);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi ;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 ;

32. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
33. Peraturan Bupati Ngawi No 5.1 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender ;
34. Peraturan Bupati Ngawi No. 4 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kabupaten Ngawi ;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Perubahan kedua Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi Tahun 2021 – 2026 ini disusun dengan maksud :

1. Sinkronisasi dan penyesuaian dengan kebijakan daerah dan Pusat yang tertuang dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, ditindaklanjuti dengan Perubahan Pohon Kinerja Perangkat Daerah hasil asistensi oleh Kementerian PAN-RB yang mempengaruhi Perubahan Kegiatan/Sub Kegiatan beserta indikator kinerja dan targetnya pada Renstra-PD, Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati Ngawi Nomor 17 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
2. Menjadi payung hukum terhadap RENJA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2023 - 2024 dengan tetap menjaga konsistensi terhadap dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Ngawi Tahun 2021 – 2026 yang secara operasional memuat program dan kegiatan terkait urusan komunikasi informatika, statistik dan persandian yang dilaksanakan oleh

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi selama kurun waktu Tahun 2023-2026.

3. Menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang berfungsi sebagai acuan dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat berdasarkan prioritas pembangunan sampai dengan tahun 2026.
4. Pemutakhiran ketiga sub kegiatan pada aplikasi SIPD – RI berdasarkan hasil Sosialisasi dari Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2023
5. Perubahan pada Renja – PD Tahun 2024 berupa penambahan Sub Kegiatan, Pengurangan Sub Kegiatan, dan/atau perubahan target kinerja kegiatan maupun sub kegiatan.
6. Perkembangan permasalahan, kondisi dan isu strategis pada perangkat daerah yang menyebabkan penambahan kegiatan / sub kegiatan baru dan / atau indikator kinerja baru.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan kedua Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi adalah :

1. Untuk mensinkronkan/menyatukan semua kegiatan masing-masing bidang/bagian dalam satu kesatuan yang utuh;
2. Untuk menciptakan sinergisitas/keterkaitan dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan yang dilakukan pada masing-masing bidang/bagian;
3. Untuk menciptakan efisiensi dan efektifitas dalam mengalokasikan sumber daya guna menunjang penyelesaian pekerjaan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan kedua Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi Tahun 2021- 2026 disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
Menjelaskan pengertian ringkas tentang Perubahan kedua Renstra Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
- 1.2. Landasan Hukum
Merupakan uraian landasan hukum yang dipakai dalam penyusunan Perubahan kedua Renstra Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
- 1.3. Maksud dan Tujuan
Menggambarkan maksud dan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Perubahan kedua Renstra Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
- 1.4. Sistematika Penulisan
Menjelaskan Sistematika Penulisan Perubahan kedua Renstra Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
- 2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
- 2.4 Tantangan dan peluang pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi Jawa Timur
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN Strategi dan Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB
VII KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB NON PELAYANAN
DASAR

BAB VIII PENUTUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian

Guna menunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan maka diperlukan adanya suatu instansi yang secara khusus menangani komunikasi informatika, statistik dan persandian. Dalam hal ini, Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yaitu dalam rangka pengembangan otonomi daerah khususnya dalam pembinaan dan pengelolaan Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian di lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi. Dalam mewujudkan hal tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika diberi kewenangan penuh dalam mengelola manajemen komunikasi informatika, statistik dan persandian serta Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun dasar hukum yang menjadi landasan pembentukan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian dalam melaksanakan tugas-tugasnya adalah :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 8);
2. Peraturan Bupati Ngawi No.17 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian;
3. Keputusan Bupati Ngawi No. 188/26 /404.101.2/B/2022 Tahun 2022 Tentang Penetapan Pejabat Fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Tugas Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian adalah *pembantuan dibidang Komunikasi Informatika, Statistik dan*

Persandian. Adapun yang dimaksud manajemen Komunikasi dan Informatika adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban Komunikasi dan Informatika, yang meliputi perumusan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pengelolaan informasi dan komunikasi publik, nama domain dan sub domain, E-Government di lingkup pemerintah daerah kabupaten.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut maka Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai fungsi yaitu :

- a. peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- b. peningkatan implementasi e-Government dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
- c. peningkatan sistem data yang terintegrasi secara sistematis;
- d. peningkatan keamanan informasi Pemerintah Daerah;
- e. perumusan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi publik, bidang aplikasi informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- f. pengelolaan layanan informasi publik, layanan hubungan masyarakat dan media, pengelolaan komunikasi publik untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah;
- g. pengelolaan layanan tata kelola, pengembangan aplikasi informatika dan layanan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkup Pemerintah Daerah;
- h. pengelolaan layanan manajemen data statistik sektoral sebagai walidata;
- i. pengelolaan layanan persandian dan keamanan informasi;
- j. perumusan norma, standar, prosedur dan kriteria, penyelenggaraan urusan komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- k. pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi urusan komunikasi, informatika, statistik dan persandian;

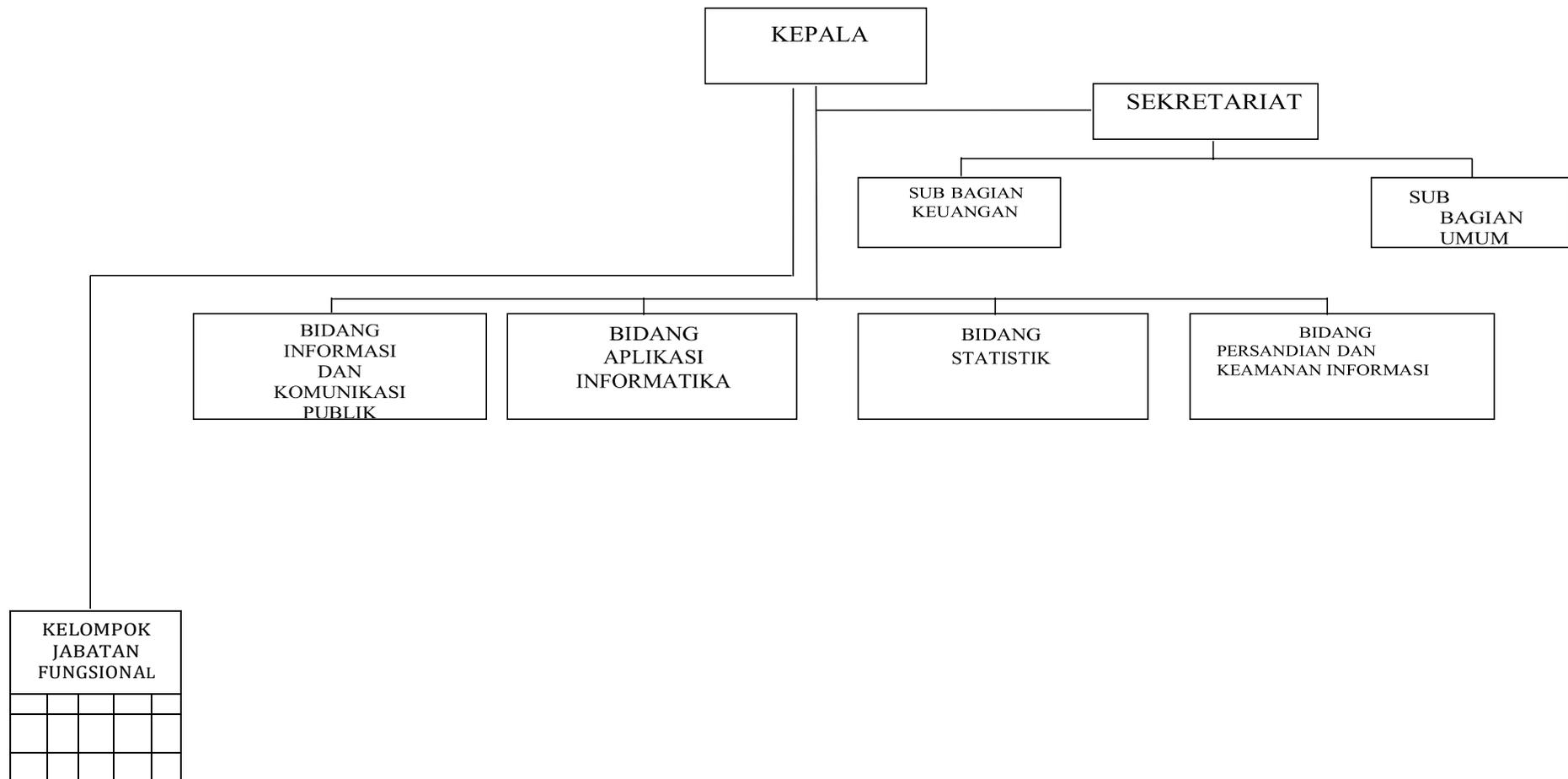
- l. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan urusan komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Aplikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Keamanan Informasi;
- n. pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut diatas, Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian diberikan kewenangan, yaitu :

- a. pengelolaan opini, aspirasi publik dan pengaduan masyarakat, pengelolaan hubungan masyarakat dan layanan media;
- b. pengelolaan komunikasi publik;
- c. penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi *Smart City*, layanan nama domain dan sub domain, pelayanan publik *Government Chief Information Officer*, pengembangan sumber daya Teknologi Informasi Komunikasi;
- d. pengelolaan aplikasi umum, khusus dan pengembangannya yang terintegrasi;
- e. pengelolaan infrastruktur, data center, layanan pengembangan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah;
- f. pengelolaan analisis perencanaan data serta pelaksanaan sebagai walidata;
- g. pengelolaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagai walidata;
- h. pengelolaan tata kelola persandian; dan
- i. pengelolaan keamanan informasi.

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian seperti dalam lampiran berikut;

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI, INFOMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN



Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian terdiri dari :

- 1) Kepala;
- 2) Sekretariat;
- 3) Bidang Informasi Komunikasi Publik;
- 4) Bidang Aplikasi Informatika;
- 5) Bidang Statistik;
- 6) Bidang Persandian dan Keamanan Informasi;
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris sedangkan masing-masing bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian (Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian tercantum dalam lampiran).

Dengan telah diberikannya kewenangan penuh kepada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian dalam mengelola manajemen Komunikasi dan Informatika maka sangat diharapkan program-program yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik dan lancar sehingga akan tercipta manajemen Komunikasi dan Informatika yang handal, profesional dan akuntabel serta mampu bersaing dalam era globalisasi dan informasi yang semakin berkembang dan maju. Agar tugas dan fungsi Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian dapat berjalan dengan baik dan lancar maka dalam pelaksanaannya dibagi dalam 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang yang mempunyai tugas dan fungsi masing-masing.

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. koordinasi kegiatan;

- b. koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- c. pengumpulan dan pengolahan data serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hukum, organisasi, hubungan masyarakat, serta kearsipan dan dokumentasi;
- e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat membawahi:

- a. Sub Bagian Umum; dan
- b. Sub Bagian Keuangan.

(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas:

- a. menyiapkan dan melaksanakan urusan tata usaha;
- b. menyiapkan dan melaksanakan urusan kepegawaian;
- c. menyiapkan dan melaksanakan urusan rumah tangga;
- d. menyiapkan dan melaksanakan urusan tata persuratan dan kearsipan;
- e. menyiapkan dan melaksanakan urusan kehumasan;
- f. melakukan pengelolaan dan inventarisasi barang milik daerah;
- g. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja;
- h. menyiapkan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
- i. mengkoordinasikan penyiapan bahan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain Sub Bagian Umum yang diberikan oleh Sekretaris.

(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. pelaksanaan urusan tata laksana keuangan;
- b. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji;
- c. pelaksanaan urusan verifikasi dan akuntansi; dan
- d. pelaksanaan urusan pelaporan keuangan.

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan rencana dan pelaksanaan peningkatan pengembangan komunikasi, informasi dan media massa sebagai sarana publikasi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pengelolaan opini dan aspirasi publik, informasi publik, hubungan masyarakat dan layanan media, pengelolaan komunikasi publik untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan informasi publik, hubungan masyarakat dan layanan media, pengelolaan komunikasi publik untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah;
- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang penyelenggaraan informasi publik, hubungan masyarakat dan layanan media, pengelolaan komunikasi publik untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah;
- e. pelaksanaan koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan dan layanan informasi komunikasi publik yang mencakup penyelenggaraan informasi publik, hubungan

- masyarakat dan layanan media, pengelolaan komunikasi publik untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan bidang tugasnya.

Bidang Aplikasi Informatika

Bidang Aplikasi Informatika mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan rencana dan pelaksanaan program dalam rangka terwujudnya layanan e-Government dan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang baik, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik, dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi Smart City, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer*;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan layanan tata kelola, pengembangan aplikasi informatika dan layanan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkup Pemerintah Daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan layanan tata kelola, pengembangan aplikasi informatika dan layanan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkup Pemerintah Daerah;
- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan layanan tata kelola, pengembangan aplikasi informatika dan layanan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkup Pemerintah Daerah;
- e. penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi layanan tata kelola, pengembangan aplikasi informatika

dan layanan infrastuktur Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkup Pemerintah Daerah;

- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan Bidang Aplikasi Informatika; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan bidang tugasnya.

Bidang Statistik

Bidang Statistik mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan rencana dan pelaksanaan dalam rangka terwujudnya standarisasi dan integrasi data statistik sektoral;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan layanan penetapan standar format data, metadata, interoperabilitas data, interkonektivitas data, *Application Programming Interface* dalam mendukung layanan serta peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia sebagai walidata;
- c. pelaksanaan kebijakan layanan penetapan standar format data, metadata, interoperabilitas data, interkonektivitas data, *Application Programming Interface* dalam mendukung layanan serta peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia sebagai walidata;
- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria layanan penetapan standar format data, metadata, interoperabilitas data, interkonektivitas data, *Application Programming Interface* dalam mendukung layanan serta peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia sebagai walidata;
- e. penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di layanan penetapan standar format data, metadata, interoperabilitas data, interkonektivitas data, *Application*

- Programming Interface dalam mendukung layanan serta peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia sebagai walidata;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pada bidang Statistik; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan bidang tugasnya.

Bidang Persandian dan Keamanan Informasi

Bidang Persandian dan Keamanan Informasi mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan rencana dan pelaksanaan dalam rangka penyelenggaraan keamanan informasi e-Government;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang Persandian dan Keamanan Informasi, meliputi Tata Kelola Persandian dan Keamanan Informasi;
- c. pelaksanaan kebijakan bidang Persandian dan Keamanan Informasi, meliputi Tata Kelola Persandian dan Keamanan Informasi;
- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Persandian dan Keamanan Informasi;
- e. penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Persandian dan Keamanan Informasi;
- f. pengelolaan informasi berklasifikasi;
- g. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan Bidang Persandian dan Keamanan Informasi; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan bidang tugasnya.

2.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi dan informatika

Guna menunjang pencapaian tujuan kegiatan pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian maka sangat diperlukan adanya Sumber daya yang menjadi faktor yang mendukung yaitu :

1. Sumber Daya Manusia / Aparatur

Aparatur yang bekerja di Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian merupakan faktor yang sangat mendukung dalam proses menjalankan tugas pokok Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian yaitu melaksanakan manajemen komunikasi dan informatika. Hal ini perlu diberdayakan agar dapat bekerja secara optimal tetapi tetap memperhatikan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing individu.

Sumber Daya Manusia/Aparatur pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi dibagi dalam bagian dan bidang dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas : 1 (satu) orang (L)
- b. Sekretariat terdiri dari :
 - Sekretaris : 1 (satu) orang (L)
 - Kasubag Keuangan : 1 (satu) orang (P)
 - Kasubag Umum : 1 (satu) orang (L)

Pelaksana pada Sekretariat : 7 (tujuh) orang

Terdiri dari 3 orang (P) dan 4 orang (L)
- c. Bidang Informasi Komunikasi Publik
 - Kabid Informasi Komunikasi Publik : 1 (satu) orang(L)

Pelaksana pada Bidang Informasi Komunikasi Publik: 5 (lima) orang

Terdiri dari 1 orang (P) dan 4 orang (L)
- d. Bidang Aplikasi Informatika

➤ Kabid Aplikasi Informatika : 1 (satu) orang (L)

Pelaksana pada Bidang Aplikasi Informatika : 6 (enam) orang

Terdiri dari 1 orang (P) dan 5 orang (L)

e. Bidang Statistik

➤ Kabid Statistik : 1 (satu) orang (P)

Pelaksana pada Bidang Statistik : 6 (enam) orang

Terdiri dari 2 orang (P) dan 4 orang (L)

f. Bidang Persandian dan Keamanan Informasi

➤ Kabid Persandian dan Keamanan Informasi : 1 (satu) orang (L)

Pelaksana pada Bidang Persandian dan Keamanan Informasi : 5 (lima) orang , Terdiri dari 5 orang (L)

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi dan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 17 Tahun 2022 bahwa pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian terdapat kelompok jabatan fungsional teknis, yaitu 13 (orang) orang Persandian.

Adapun sumber daya manusia/aparatur yang ada pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian sejumlah 55 (lima puluh lima) orang dengan perincian sebagai berikut :

NO.	URAIAN	JUMLAH	PROSENTAS E	
1.	Tingkat Pendidikan	S-2	8	14,81 %
		S-1	35	64,81 %
		D3	3	5,55 %
		D2	1	1,85 %
		SLTA	6	37,25 %
		SMP	1	11,11 %

		SD	-	-
2.	Golongan Ruang	Gol. I	1	1,85 %
		Gol. II	16	33,33 %
		Gol. III	32	29,62 %
		Gol. IV	5	9,25 %
3.	Jenis Kelamin	Laki-laki	37	67,27 %
		Perempuan	18	32,72 %
4.	Jenis Eselon	Eselon II/b	-	-
		Eselon III/a	1	1,85 %
		Eselon III/b	4	7,40 %
		Eselon IV/a	15	27,77 %
		Staf	34	62,96 %

Disamping itu, yang perlu diperhatikan adalah Pegawai Negeri Sipil yang memasuki Batas Usia Pensiun. Adapun dalam jangka waktu 4 (empat) tahun yaitu 2017 s/d 2021 terdapat Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian yang pensiun yaitu :

No.	Tahun	Jumlah Yang Pensiun (orang)	Keterangan
1	2017	2	Eselon IV/a = 1 orang Staf = 1 orang
2	2018	4	Eselon IV/a = 2 orang Staf = 2 orang
3	2019	1	Staf = 1 orang
4	2020	3	Eselon III/b = 1 orang Staf = 2 orang
5	2021	1	Eselon II/b = 1 orang Staf = 1 orang
JUMLAH		11	

Dengan mendasar pada gambaran umum terhadap Sumber Daya Manusia pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian yang responsif gender, maka dapat diketahui potensi yang ada sehingga dapat dioptimalkan semaksimal mungkin guna menunjang beban pekerjaan yang ada. Disamping itu, juga dapat diprediksi terhadap kebutuhan pegawai yang disesuaikan dengan beban kerja yang ada, hal ini dikarenakan adanya beberapa pegawai yang telah memasuki Batas Usia Pensiun (BUP).

1. Sarana dan Prasarana

Disamping SDM/Aparatur, faktor pendukung yang lain dalam menjalankan manajemen komunikasi dan informatika adalah sarana dan prasarana. Dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai maka sangat diharapkan setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian saat ini menempati gedung eks Dinas Perikanan dan Peternakan. Adapun sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian sebagai berikut :

NO.	JENIS BARANG	JUMLAH	KONDISI	
			CUKUP BAIK	RUSAK
1.	Meja kerja	31	31	
2.	Kursi Kerja	61	61	
3.	Meja Pejabat	1	1	
4.	Kursi Pejabat	1	1	
5.	CPU	3	3	
6.	Monitor	5	5	
7.	Key Board	2	2	
8.	Mouse	1	1	
9.	Printer	2	2	
10.	Laptop	1	1	
11.	Mobil Operasional	4	4	
12.	Mobil Dinas	1	1	
13.	Motor Operasional	9	9	

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Kinerja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi diarahkan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian, meliputi ;

- a. PENERAPAN TATA KELOLA TIK, dalam hal ini Peningkatan e-Gov Tata Kelola TIK diatur dalam Peraturan Bupati Ngawi Nomor 11.a tahun 2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi. Sedangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diatur dalam Peraturan Bupati Ngawi Nomor 1.a tentang SPBE dan Surat Edaran Sekretariat Daerah Nomor 480/790/404.114/2019 tentang Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi. Peraturan Bupati Ngawi dan Surat Edaran Sekretariat Daerah ini menjadi acuan perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam pembangunan dan pengembangan TIK;
- b. SURAT MENYURAT ELEKTRONIK (E-OFFICE), dimaksudkan untuk mempermudah pekerjaan administrasi perkantoran yang dilakukan secara elektronik dan menggunakan bantuan alat komunikasi dan system informasi;
- c. INFRASTRUKTUR JARINGAN TIK, merupakan layanan fasilitasi keterhubungan antar SKPD untuk mengintegrasikan, sistem informasi, pertukaran data dan informasi dalam rangka mengimplementasikan e-government dan layanan publik;
- d. PEMBERDAYAAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) merupakan upaya untuk memberdayakan lembaga komunikasi sosial yang berbasis kelompok masyarakat dengan tugas untuk

- mengumpulkan, mengolah dan menyebarkan informasi khususnya yang berkenaan dengan potensi wilayah sekitarnya;
- e. MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK / ON-LINE merupakan fasilitas akses informasi berbasis TIK untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat melalui publikasi penyelenggaraan pemerintah daerah baik melalui media cetak, situs www.kominfo-ngawikab.go.id dan media sosial Facebook, Instagram, Radio Suara Ngawi;
 - f. MAJALAH TRINIL DAN GALERI, merupakan sarana / media untuk penyebaran informasi kepada masyarakat;
 - g. NGOPI BARENG (NGOBROL PINTAR BARENG), merupakan salah satu kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi publik antara pimpinan daerah dan masyarakat secara langsung dengan masyarakat sebagai public sphere untuk menampung ide, gagasan, masukan dan keluhan masyarakat secara interaktif. Program ini dinilai tepat sasaran dalam era keterbukaan informasi publik serta banyak memberikan manfaat bagi masyarakat luas;
 - h. HELP DESK PPID DAN SENKETA INFORMASI, merupakan jenis pelayanan informasi masyarakat yang berkaitan dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Para pemohon informasi akan dilayani oleh PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan (SOP);
 - i. HELP DESK SP4N LAPOR merupakan jenis pelayanan pengaduan opini dan aspirasi publik dari masyarakat dan akan diteruskan kepada pihak yang berwenang menangani untuk segera ditindaklanjuti;
 - j. NGAWI COMMOND CENTER (NCC) merupakan pusat informasi bagi Pemerintah Kabupaten Ngawi dan masyarakat untuk mendapatkan data maupun informasi yang diperlukan untuk kelangsungan pemerintahan dan layanan informasi publik maupun penyebaran informasi kepada masyarakat yang bersifat umum dan khusus;
 - k. INFRASTRUKTUR JARINGAN TIK merupakan layanan fasilitasi

keterhubungan antar OPD untuk mengintegrasikan, sistem informasi, pertukaran data dan informasi dalam rangka mengimplementasikan e-goverment dan layanan publik;

- l. UBLIK (Umyek Bareng Lintas Komunitas), merupakan salah satu kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi publik yang melibatkan Lintas Komunitas yang ada di Ngawi Program ini dinilai tepat sasaran dalam era keterbukaan informasi publik;
- m. DUNIA ANAK merupakan salah satu kegiatan mendukung Program Layak Anak dan menjadi wadah dan penyebarluasan informasi terkait pengembangan potensi bakat anak dan meningkatkan kreativitas disetiap lembaga pendidikan anak.

Adapun pencapaian dan rencana pencapaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dapat dilihat pada tabel T-C.23 dan T-C.24 sebagaimana terlampir.

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Ngawi

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Persentase layanan e-Government yang terintegrasi	-	-	-	-	20%	45%	70%	90%	-	25%	45%	70%	100%	-	125.00	100.00	100.00	111.11
2.	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat /Standart Kepuasan Masyarakat)	-	-	-	-	72	73	74	74	-	61.36	62.24	63.107	76.15	-	85.22	85.26	85.28	102.91
3.	Persentase KIM yang mengaplikasikan TIK dlm aktivitasnya	-	-	-	-	23.81%	38.10%	52.38	71.43%	-	42.86%	38.10%	52.38	71.43%	-	180.01	100.00	100.00	100.00
			IKK OUTCOME																
			Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	-	-	-	-	100	97.87	-	-	-	100	97.87	-	-	-	100	100
			Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	-	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100
			Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	-	-	-	-	68.58	100	-	-	-	68.58	100	-	-	-	100	100
			Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	-	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100
			Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	-	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100
			Tingkat keamanan informasi pemerintah	-	-	-	-	30	60.93	-	-	-	30	60.93	-	-	-	100	100

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)
			IKK OUTPUT																
			Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	-	-	-	-	97.87	-	-	-	-	97.87	-	-	-	-	100	
			Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	-	-	-	-	97.87	-	-	-	-	97.87	-	-	-	-	100	
			Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	-	-	-	-	ADA	-	-	-	-	ADA	-	-	-	-	ADA	
			Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	
			Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	
			Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan	-	-	-	-	26	-	-	-	-	26	-	-	-	-	100	
			Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	-	-	-	-	93	-	-	-	-	93	-	-	-	-	100	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)
			Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	14	-	-	-	-	100
			Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	100
			Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	-	-	-	-	-	29	-	-	-	-	29	-	-	-	-	100
			Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100
			Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100
			Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	-	-	-	-	-	81	-	-	-	-	81	-	-	-	-	100
			Persentase data yang dapat berbagi pakai	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	60	-	-	-	-	100
			Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	-	-	-	-	-	23	-	-	-	-	23	-	-	-	-	100
			Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	10	-	-	-	-	100
			Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi egovernment	-	-	-	-	-	ADA	-	-	-	-	ADA	-	-	-	-	ADA

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)
			Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	
			Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	
			Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	
			Tersedianya buku profil daerah	-	-	-	-	ADA	-	-	-	-	ADA	-	-	-	-	ADA	
			Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	100	
			Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	100	
			Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	100	
			Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	100	
			Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	-	-	-	-	40.74	-	-	-	-	40.74	-	-	-	-	100	
			Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	-	-	-	-	44.44	-	-	-	-	44.44	-	-	-	-	100	
			Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)
			Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip - prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	
			Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	
			Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	

Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Ngawi

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		1(2016)	2(2017)	3(2018)	4(2019)	5(2020)	1(2016)	2(2017)	3(2018)	4(2019)	5(2020)	1(2016)	2(2017)	3(2018)	4(2019)	5(2020)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.	Pengembangan Layanan e-government	-	2,613,264,000	1,178,978,600	1,515,000,000	1,194,900,900	-	2,554,525,887	1,134,042,647	1,495,169,150	1,187,028,000	-	97.75	96.19	98.69	99.34	777,775,840	763,247,899
2.	Pelayanan Peningkatan Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian	-	-	3,858,510,000	4,640,000,000	5,568,425,000	-	-	3,653,866,000	4,511,572,951	5,403,353,000	-	#DIV/0!	94.70	97.23	97.04	2,041,684,960	2,161,341,160
3.	Pelayanan Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	-	3,098,834,250	1,393,066,400	1,550,000,000	1,894,413,600	-	2,439,165,588	1,304,431,733	1,539,830,900	1,874,040,500	-	78.71	93.64	99.34	98.92	967,495,940	1,010,502,487
4.	Pelayanan Pengelolaan Layanan Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat	-	268,529,750	275,000,000	290,930,000	316,000,000	-	203,495,740	203,734,000	284,095,560	192,846,200	-	75.78		97.65	61.03	176,385,940	117,885,220

Pencapaian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian telah diuraikan dalam Tabel T-C 23, selama rentang waktu 2017 – 2021 sudah banyak membuahkan hasil dengan sudah tercapainya beberapa indikator yang menjadi target capaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian dalam pencapaiannya tidak ada kesenjangan/gap pelayanan karena dari masing – masing bidang yang menangani tupoksi komunikasi dan informatika saling berkaitan dan berkesinambungan sehingga untuk mewujudkan layanan publik yang baik harus tersedia layanan infrastruktur maupun sarana prasarana pendukung yang memadai, seluruh pelayanan publik baik yang terkait dengan layanan e – government, layanan informasi komunikasi, layanan jasa telekomunikasi, layanan media serta layanan pengaduan target telah tercapai, faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini adalah karena didukung dengan infrastruktur yang memadai dan sumber daya manusia yang handal, dengan analisis capaian kinerja yang sudah tercapai ada beberapa potensi dan permasalahan pelayanan kinerja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian yang harus lebih kita tingkatkan kinerjanya terkait dengan keterbukaan informasi publik dan pencapaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Rasio antara realisasi dan anggaran secara keseluruhan baik karena realisasi hampir mendekati 100 %, di Tahun 2020 ada pencapaian realisasi Program Pelayanan Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat yang tidak bisa terlaksana keseluruhan dikarenakan rencana belanja untuk replikasi aplikasi pengaduan masyarakat tidak bisa terserap dikarenakan jenis aplikasinya umum dari Kementerian sehingga tidak bisa direplikasi untuk pengembangannya, sehingga kedepannya bisa menjadi bahan pertimbangan untuk pengalokasian pendanaan agar bisa lebih diprioritaskan untuk pencapaian kinerja yang lebih urgent.

Tingkat capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian sudah dilaksanakan secara

bertahap sesuai Tujuan dan Sasaran Renstra mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 yang mana prioritas utama adalah pembangunan infrastruktur terkait pembangunan jaringan Fiber Optik di 27 titik dan pembangunan Data Center dalam rangka menunjang kelancaran ketersediaan jaringan Informasi teknologi di Kabupaten Ngawi dalam rangka untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur TIK dan layanan publik. Sesuai kewenangannya maka untuk pengadaan Bandwidth untuk seluruh OPD, kecamatan, ruang publik dan pasar dalam rangka menunjang kelancaran dalam pelayanan publik maka pengadaan Bandwidth semua dicukupi oleh Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian. Dalam pelayanan e – government sudah diterapkan sesuai manajemen SPBE secara efisien, efektif dan berkesinambungan dengan langkah mempercepat implementasi SPBE yang terintegrasi meliputi ; integrasi perencanaan, penganggaran, pengadaan, integrasi data kepegawaian, integrasi data kearsipan, integrasi pengaduan publik, pembangunan pusat data nasional untuk meningkatkan nilai SPBE agar menjadi lebih baik lagi, selain itu juga telah disusun Dashboard eksekutif dalam rangka persiapan penyusunan Data Statistik Sektoral Satu Data Indonesia, selain itu juga penerapan sistem elektronik berbasis android dalam pemerintahan dalam rangka pengelolaan layanan publik sesuai standart Ditahun 2021 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian juga telah membangun Mini Command Center.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang komunikasi informatika, statistik dan persandian dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran tugas kegiatan pengembangan komunikasi, informasi dan media massa;

2. Peningkatan kinerja sumber daya manusia dalam pengembangan komunikasi, informasi dan media;
3. Konsistensi dan penegakan aturan dalam pengembangan komunikasi, informasi dan media massa;
4. Peningkatan Akses Masyarakat terhadap informasi;
5. Fasilitas untuk Peningkatan Hubungan Masyarakat yang memadai;
6. Pengelolaan Layanan Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat yang baik;
7. Terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang mengelola Layanan Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat.

Beberapa tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan TIK yaitu :

Tantangan :

1. Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik;
2. Pesatnya perkembangan TIK;
3. Ketersediaan Infrastruktur TIK yang belum merata;
4. Terbatasnya pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap TIK;
5. Data yang tidak akurat dan terpercaya;
6. Kesenjangan informasi di masyarakat;

Peluang :

1. Kepedulian pimpinan terhadap bidang kominfo
2. Pengembangan dan Pemanfaatan Smart Province oleh Perangkat Daerah
3. Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik
4. Kebutuhan pengembangan SPBE
5. Tersedianya data sektoral
6. Tersedianya perundangan yang mendasari regulasi bidang Kominfo
7. Kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian terdapat beberapa permasalahan, antara lain :

1. Perlu kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan pelayanan umum di bidang komunikasi dan informatika.
2. Belum terlaksananya pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi mengenai pelayanan umum di bidang komunikasi dan informatika.
3. Perlu Pembangunan Infrastruktur sarana dan prasarana yang memadai untuk Teknologi Informatika yang dibutuhkan.
4. Kecukupan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensinya.
5. Perlu pendidikan dan pelatihan bagi ASN Dinas Komunikasi dan Informatika untuk memenuhi kebutuhan peningkatan kinerja.

Identifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya disajikan pada Tabel T-B.35 dengan format sebagaimana terlampir.

Tabel T-B.35.
Pemetaan Permasalahan Urusan Komunikasi Informatika, Urusan Statistik dan Urusan Persandian

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Belum optimalnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Kabupaten Ngawi	Belum optimalnya pengelolaan dan layanan informasi publik	Belum ada perumusan Kebijakan Teknis yang mengakomodir Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
			Kurangnya pemahaman masyarakat untuk melaporkan dan menyampaikan aspirasi dan pengaduan
			Belum ada penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah
			Belum terstruktur nya pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik
			Masih rendahnya kapasitas SDM dalam mengelola konten dan perencanaan media komunikasi publik
			Masih rendahnya kapasitas SDM dalam mengelola media komunikasi publik
			Pengoptimalan peran radio sebagai saluran penyebaran informasi
			Sarana dan prasarana peralatan radio yang sudah tidak layak
		Belum optimalnya pengelolaan dan layanan informasi publik	Belum Optimalnya PPID Pembantu dalam menyajikan data informasi publik di masing-masing OPD.

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
(1)	(2)	(3)	(4)
			Belum ada regulasi untuk juklak dan juknis pelaksanaan koordinasi komunikasi (Bakohumas) dan fungsinya untuk kegiatan publikasi, promosi, peliputan, dan dokumentasi kegiatan Pemerintah Daerah dan publik
		Belum optimalnya pengelolaan dan layanan informasi publik	Kurangnya pendampingan bagi masyarakat pedesaan agar semakin cerdas dalam memanfaatkan dunia digital secara baik dan benar
			Pemberitaan dan Branding yang harus selalu update
			Masih rendahnya kapasitas SDM dalam penguatan sumber daya komunikasi publik
			Sarana dan prasarana belum sesuai spesifikasi khusus dalam rangka penguatan kapasitas SDM
			Belum tersedia perturan daerah untuk juknis dan juklak, pelaksanaan kerjasama publikasi dengan media dan banyaknya media yang masuk
			Kurang optimalnya SDM dan sarana penunjang (peralatan) untuk meningkatkan kualitas liputan dan dokumentasi liputan
		Minimnya Layanan Publik dan Pemerintah Berbasis Elektronik/Web	Minimnya Orientasi Layanan Publik yang Berbasis Elektronik
2.	Tidak ada standar dalam pengembangan aplikasi yang terintegrasi	Aplikasi yang ada, tidak memiliki standar yang sama, sehingga sulit untuk diintegrasikan	Minimnya terjadinya Integrasi Aplikasi dan Data Sistem Informasi Pemkab.
		Infrastruktur jaringan yang belum optimal	Topografi dan topologi wilayah menyebabkan Masih adanya wilayah yang belum terjangkau infrastruktur jaringan TIK
			Kurangnya pemahaman pemerintah desa dalam mengalokasikan infrastruktur TIK

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
(1)	(2)	(3)	(4)
3.	Minimnya integrasi pelayanan administrasi Pemerintahan	Belum optimalnya Tata Kelola SPBE	Kurangannya peran APIP dalam Pengawasan Pelaksanaan SPBE
		Penerapan SPBE bagi Layanan Internal Birokrasi dan Layanan Publik Tidak menjadi prioritas program kerja pembangunan sesuai visi misi pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak terintegrasinya aplikasi; berdampak pada besar kecilnya anggaran TIK; '- Tidak dimilikinya dokumentasi arsitektur dan peta jalan SPBE yang digunakan sebagai acuan pengembangan SPBE; '- Tidak ada komitmen bersama pengembangan SPBE antar unit; '- Dokumen rencana induk tidak berkekuatan untuk di jalankan.
			Belum optimalnya pengelolaan Data Centre dan Call Center
			Belum optimalnya sistem komunikasi intra pemerintah daerah
			Minimnya integrasi pelayanan administrasi Pemerintahan
			Minimnya Integrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja, Pemantauan dan Evaluasi
4.	Masterplan Smart City Existing tidak sesuai dengan kebutuhan	Minimnya tumbuhnya ekosistem Smart City	Kurangannya komitmen stakeholder terkait dalam implementasi Smart City secara menyeluruh
5.	Kapasitas SDM belum sesuai dengan kebutuhan	Belum terwujudnya SDM TIK yang optimal	Rendahnya pemahaman tentang pemanfaatan TIK
6.	Masterplan Smart City Existing tidak sesuai dengan kebutuhan	Minimnya tumbuhnya ekosistem Smart City	Kurangannya komitmen stakeholder terkait dalam implementasi Smart City secara menyeluruh
7.	Kapasitas SDM belum sesuai dengan kebutuhan	Belum terwujudnya SDM TIK yang optimal	Rendahnya pemahaman tentang pemanfaatan TIK
		Belum terwujudnya fungsi GCIO	Pengetahuan akan GCIO kurang
8.	Standar baku statistik sektoral	Kualitas dan kuantitas data statistik yang belum sesuai dengan standar baku	Standarisasi dan integrasi data statistik sektoral skala Kabupaten/Kota

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
(1)	(2)	(3)	(4)
9.	Tata kelola statistik sektoral Skala Kabupaten/Kota	Masih rendahnya pengelolaan data administrasi	Pelaksanaan mekanisme penjaminan kualitas data
10.	Sumber Daya Manusia	Ketersediaan kuantitas dan kualitas SDM statistik di pemerintah provinsi/kab/kota yang belum memadai	Capacity Building terkait produk statistik, rule statistik, bisnis proses statistik, diseminasi produk statistik sektoral skala Kabupaten/Kota
		Rendahnya kepercayaan pengguna data terhadap Data Statistik Sektoral	Belum ada standart baku dan tidak sinkron
			Lemahnya koordinasi antar OPD dan keterbukaan informasi belum optimal
			Belum optimalnya manajemen kelembagaan statistik sektoral
11.	Infrastruktur	Ketersediaan infrastruktur yang mendukung kegiatan statistik sektoral di pemerintah kab/kota yang belum memadai	Pengadaan infrastruktur yang mendukung kegiatan statistik daerah
			Pengelolaan data belum dikoordinasikan secara terpadu
12.	Belum terjaminnya keamanan informasi dalam e-governmet	Fungsi identifikasi kerentanan dan penilaian risiko di bidang keamanan informasi belum terlaksana secara efektif dan efisien	Pembangunan dan penerapan fungsi identifikasi dan deteksi di bidang keamanan informasi
13.	Keamanan informasi perlu mengikuti perkembangan TIK yang sangat pesat memberi peluang inovasi TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan	Fungsi proteksi di bidang keamanan informasi belum terlaksana secara efektif dan efisien	Pembangunan dan penerapan fungsi proteksi di bidang keamanan informasi
		Lemahnya kebijakan tata kelola dan manajemen keamanan informasi dilingkup Pemerintah Daerah	Fungsi penanggulangan dan pemulihan di bidang keamanan informasi belum terlaksana secara efektif dan efisien

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
(1)	(2)	(3)	(4)
		Penataan dan kedudukan organisasi pelaksana urusan pemerintah bidang persandian belum dilakukan sesuai ketentuan	Lemahnya kebijakan tata kelola dan manajemen keamanan informasi Pemerintah Daerah
		Kurangnya kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia di bidang keamanan informasi	Belum optimalnya jaring komunikasi sandi internal pemerintah daerah

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

- VISI

“SEMESTA BERENCANA”

“Terwujudnya masyarakat Kabupaten Ngawi yang mandiri, berakhlak, makmur dan berdaya saing berbasis agropolitan dengan semangat gotong royong dalam bingkai NKRI”

MISI

1. Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing melalui kemudahan terhadap akses pelayanan kepada masyarakat.
2. Mengembangkan perekonomian kerakyatan melalui kemudahan investasi, pariwisata berbasis potensi lokal dan pertanian ramah lingkungan berkelanjutan didukung riset dan teknologi
3. Meningkatkan etos kerja dan integritas aparatur pemerintahan guna memberikan pelayanan prima
4. Meningkatkan kualitas infrastruktur guna percepatan pembangunan yang berkesinambungan
5. Meningkatkan kondusifitas daerah melalui pengembangan budaya lokal yang berlandaskan keagamaan dan gotong-royong

Dari Visi dan Misi diatas, Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian ikut mengampu misi : Misi ke-3 yaitu : Meningkatkan etos kerja dan integritas aparatur pemerintahan guna memberikan pelayanan prima

Tujuannya yaitu :

1. Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah;
2. Meningkatnya Kualitas tata kelola pemerintahan

Sasarannya yaitu :

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
(1)	(2)	(3)	(4)
		Penataan dan kedudukan organisasi pelaksana urusan pemerintah bidang persandian belum dilakukan sesuai ketentuan	Lemahnya kebijakan tata kelola dan manajemen keamanan informasi Pemerintah Daerah
		Kurangnya kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia di bidang keamanan informasi	Belum optimalnya jaring komunikasi sandi internal pemerintah daerah

1. Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah;
2. Meningkatnya implementasi e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
3. Mewujudkan sistem data yang terintegrasi secara sistematis;
4. Meningkatnya keamanan informasi pemerintah daerah.

Faktor pendukung pencapaian visi dan misi ;

1. Reformasi birokrasi sudah terimplementasi secara bertahap;
2. Infrastruktur jaringan Fiber Optic yang sudah terbangun sehingga implementasi e-government dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat ;
3. Sudah terbangun Portal data dalam rangka menuju Satu Data Indonesia;

Faktor penghambat pencapaian visi dan misi ;

1. Mindset semua perangkat daerah terkait tata kelola TIK yang belum memahami secara menyeluruh;
2. Belum optimalnya pengelolaan dan layanan informasi publik;
3. Belum terwujudnya fungsi GCIO;
4. Kualitas dan kuantitas data statistik yang belum sesuai dengan standar baku;
5. Fungsi proteksi di bidang keamanan informasi belum terlaksana secara efektif dan efisien.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Prop.Jawa Timur.

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2020-2024

VISI : Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong

MISI :

- | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian Bangsa.6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada warga8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
<p>1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas diseluruh wilayah Indonesia</p> <p>2. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital; dan</p> <p>3. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik</p>	<p>1. Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau;</p> <p>2. Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital;</p> <p>3. Meningkatnya konektivitas layanan pos;</p> <p>4. Terwujudnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional;</p> <p>5. Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika;</p> <p>6. Meningkatnya pemanfaatan TIK disektor ekonomi dan bisnis;</p>	<p>Menuntaskan penyediaan internet cepat dan berkualitas di desa yang belum terlayani termasuk lokasi layanan publik</p>	<p>1. Mempercepat penyelesaian penyediaan internet cepat dan berkualitas di daerah yang secara ekonomi kurang layak bagi operator, termasuk lokasi layanan publik;</p> <p>2. Mempercepat digitalisasi penyiaran (<i>analog switch off</i>), untuk meraih <i>digital dividend</i>; dan</p> <p>3. <i>Farming</i> dan <i>refarming</i> frekuensi untuk layanan internet cepat dan berkualitas.</p>
		<p>Mendorong penerapan teknologi berorientasi ke depan</p>	<p>1. Menata alokasi frekuensi untuk memenuhi kebutuhan implementasi <i>next broadband</i> (5G);</p> <p>2. Mengembangkan dan mengimplementasikan teknologi 5G nasional; dan</p> <p>3. Penyediaan teknologi pengendalian konten di internet untuk internet bersih dan aman.</p>
		<p>Mengembangkan SDM talenta digital dan</p>	<p>1. Mengakselerasi kompetensi SDM talenta digital dan</p>

<p>7. Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital;</p> <p>8. Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah</p> <p>9. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik;</p> <p>10. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.</p>	<p>ekosistem ekonomi digital</p>	<p>meningkatkan literasi digital masyarakat; dan</p> <p>2. Mempercepat transformasi digital pada sektor-sektor ekonomi dan bisnis.</p>
	<p>Integrasi Pusat Data Nasional dan transformasi digital pemerintahan</p>	<p>1. Mempercepat pembangunan dan pemanfaatan Pusat Data Nasional menuju Satu Data Indonesia; dan</p> <p>2. Mendukung percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).</p>
	<p>Mempercepat penyelesaian legislasi primer</p>	<p>Mendorong penyelesaian kebijakan dan regulasi terkait TIK baik Undang-Undang, Perpres, ataupun Peraturan Menteri, meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait.</p>
	<p>Melakukan orkestrasi komunikasi publik melibatkan perangkat pemerintah pusat dan daerah</p>	<p>Membangun pengelolaan komunikasi publik yang efektif dan terorganisir; dan</p> <p>Membangun tim yang solid dan responsif dalam mengkonter hoaks dan diseminasi kebijakan pemerintah.</p>
	<p>Meningkatkan kualitas layanan</p>	<p>Mendorong inovasi dalam manajemen internal antara lain</p>

		manajemen internal	penerapan <i>smart services</i> , dan inovasi perencanaan penganggaran.
--	--	--------------------	-------------------------------------------------------------------------

RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019-2024

<p>VISI : "Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong"</p>			
<p>MISI 3 : "Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan"</p>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Transparansi, Akses dan Data Sektoral dengan	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur	Mengoptimalkan Kualitas Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur
Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pelayanan Publik	2. Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Transparansi, Akses, Interaktivitas Publik dan layanan infrastruktur di Jawa Timur	1. Meningkatkan pemberdayaan lembaga komunikasi publik dalam pelayanan hubungan komunikasi pemerintah	Pengembangan konsep pengelolaan komunikasi publik yang efektif dalam bentuk penyediaan informasi, penyebarluasan informasi dan pelayanan hubungan komunikasi
		2. Mengembangkan smart Province yang didasari integrasi aplikasi dan integrasi data	Mengoptimalkan regulasi Pengembangan dan Pemanfaatan Smart Province oleh Perangkat Daerah

3. Meningkatnya ketersediaan dokumen statistik yang terpercaya dan berkualitas	Meningkatkan pemanfaatan data statistik sektoral yang akurat, akuntabel dan terpercaya dengan berpedoman pada kebijakan Satu Data Provinsi Jawa Timur	Mengoptimalkan Pemenuhan Ketersediaan Data Statistik Sektoral yang akurat, akuntabel dan terpercaya
4. Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap Kebijakan Keamanan Informasi	Meningkatkan kesadaran keamanan informasi kepada Perangkat Daerah dilingkungan Pemprov. Jawa Timur	Standart Keamanan Informasi bagi Perangkat Daerah dilingkungan Pemprov. Jawa Timur

RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2021 - 2026

<p>VISI : " SEMESTA BERENCANA "</p> <p>"Terwujudnya masyarakat Kabupaten Ngawi yang mandiri, berakhlak, makmur dan berdaya saing berbasis agropolitan dengan semangat gotong royong dalam bingkai NKRI"</p>			
<p>MISI : Meningkatkan etos kerja dan integritas aparatur pemerintahan guna memberikan pelayanan prima</p>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya yang ada di Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi	Meningkatkan pemahaman implementasi Reformasi Birokrasi dan SAKIP dalam memberikan pelayanan publik
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Meningkatnya implementasi e-government dalam	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur Dinas Kominfo Kabupaten Ngawi Meningkatkan pelayanan publik dalam rangka keterbukaan informasi 	<p>Meningkatkan Kualitas Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo Kabupaten Ngawi</p> <p>Pengembangan konsep pengelolaan komunikasi publik yang efektif dalam bentuk penyediaan</p>

	penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	publik melalui pemberdayaan lembaga komunikasi publik 3. Mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang didasari integrasi aplikasi dan integrasi data	informasi, penyebarluasan informasi dan pelayanan hubungan komunikasi Mengimplementasikan e - Government / SPBE
	Mewujudkan sistem data yang terintegrasi secara sistematis	Meningkatkan pemanfaatan data statistik sektoral yang akurat, akuntabel dan terpercaya dengan berpedoman pada kebijakan Satu Data Indonesia	Mengoptimalkan Pemenuhan Ketersediaan Data Statistik Sektoral yang akurat, akuntabel dan terpercaya
	Meningkatkan keamanan informasi pemerintah daerah	Meningkatkan kesadaran keamanan informasi kepada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi	Standart Keamanan Informasi bagi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Visi : “Terwujudnya masyarakat Kabupaten Ngawi yang mandiri, berakhlak, makmur dan berdaya saing berbasis agropolitan dengan semangat gotong royong dalam bingkai NKRI”				
No	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 3 : Meningkatkan etos kerja dan integritas aparatur pemerintahan guna memberikan pelayanan prima			

	Program Prioritas : 1. Branding Negeri Ngawi Ramah 2. Smart Village			
	Program Informasi Komunikasi Publik	- Belum optimalnya pengelolaan dan layanan informasi publik	Belum adanya strategi komunikasi pemerintah daerah yg merencanakan mulai dari penyusunan agenda, framing isu, pemilihan komunikator, alternatif channel(saluran media) dan monitoring media.	Tersusunnya agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah Ada SOP yg jelas terkait pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik Ada evaluasi dan monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas Akan diaktifkan lagi NGOPI BARENG (Komunikasi publik dikolaborasikan dengan serap aspirasi) Bersama Bupati dan/atau Wakil Bupati sebagai wahana mengkomunikasikan kebijakan pemerintah sekaligus menyerap aspirasi masyarakat
	Program Aplikasi Informatika	- Rendahnya jumlah Perangkat Daerah yang terlayani infrastruktur TIK - Infrastruktur jaringan yang belum optimal	- Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan DataCenter - Ketersediaan Infrastruktur TIK yang belum merata	- Komitmen Kepala Daerah mendukung peningkatan TIK
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	- Data yang tidak akurat dan terpercaya karena tidak updating - Kualitas dan kuantitas data statistik yang belum sesuai dengan standar baku	- Belum optimalnya pengintergrasian sistem informasi dan data Perangkat Daerah	- Ketersediaan data statistik sektoral
	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Belum optimalnya evaluasi secara berkala aplikasi yang telah dibangun oleh perangkat daerah	- Aplikasi yang telah dibangun oleh Perangkat Daerah masih belum semua memenuhi standar keamanan sehingga memperbesar peluang terjadinya insiden keamanan	- Aplikasi yang akan dibangun oleh Perangkat Daerah harus didampingi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika agar aplikasi tersebut dapat memenuhi standar keamanan informasi

			informasi	
--	--	--	-----------	--

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Visi : “Terwujudnya masyarakat Kabupaten Ngawi yang mandiri, berakhlak, makmur dan berdaya saing berbasis agropolitan dengan semangat gotong royong dalam bingkai NKRI”				
No	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 3 : 1. Meningkatkan etos kerja dan integritas aparatur pemerintahan guna memberikan pelayanan prima			
	Program Prioritas : 1. Branding Negeri Ngawi Ramah 2. Smart Village			
	Program Informasi Komunikasi Publik	Belum adanya manajemen isu pemerintah sehingga program dan kebijakan pemerintah lebih banyak tersampaikan secara sporadis dan situasional alih-alih terencana dan terukur	Belum adanya strategi komunikasi pemerintah daerah yg merencanakan mulai dari penyusunan agenda, framing isu, pemilihan komunikator, alternatif channel(saluran media) dan monitoring media.	Fasilitasi Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) masing-masing OPD
	Program Aplikasi Informatika	- Penerapan SPBE bagi Layanan Internal Birokrasi dan Layanan Publik Tidak	- Belum adanya mekanisme SOP Ruang Komando - Terbatasnya	- Pengembangan dan Pemanfaatan SmartCity oleh Perangkat Daerah

		<p>menjadi prioritas program kerja pembangunan sesuai visi misi pada Instansi Pusat/Pemerintah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum terintegrasinya data dan informasi OPD yang memenuhi standart Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) - Belum optimalnya Tata Kelola SPBE - Belum terwujudnya fungsi GCIO - Kurangnya Trust (kepercayaan) dari Perangkat Daerah terhadap pengembangan TIK 	<p>sumberdaya manusia TIK yang trampil dan professional</p> <ul style="list-style-type: none"> - Minimnya tumbuhnya ekosistem Smart City - Minimnya Layanan Publik dan Pemerintah Berbasis Elektronik/Web - Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK 	
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya kepercayaan pengguna data terhadap Data Statistik Sektoral - Ketersediaan infrastruktur yang mendukung kegiatan statistik sektoral di pemerintah kab/kota yang belum memadai 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya pengelolaan data administrasi - Ketersediaan kuantitas dan kualitas SDM statistik di pemerintah provinsi/kab/kota yang belum memadai 	- Ketersediaan data statistik sektoral
	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> - Penataan dan kedudukan organisasi pelaksana urusan pemerintah bidang persandian belum dilakukan sesuai ketentuan - Kurangnya kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia di bidang keamanan informasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Fungsi proteksi di bidang keamanan informasi belum terlaksana secara efektif dan efisien - Lemahnya kebijakan tata kelola dan manajemen keamanan informasi di lingkup Pemerintah Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Aplikasi yang akandibangun oleh Perangkat Daerah harus didampingi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika agar aplikasi tersebut dapat memenuhi standar keamananinformasi - Hubungan kerjasama yang baik dengan instansi vertikal guna peningkatan keamanan informasi

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Faktor – faktor dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah, dirumuskan sebagai berikut ;

1. Sarana dan prasarana infrastruktur yang mendukung kelancaran tugas kegiatan pengembangan komunikasi, informasi dan media massa;
2. Peningkatan kinerja sumber daya manusia dalam pengembangan komunikasi, informasi dan media;

3. Konsistensi dan penegakan aturan dalam pengembangan komunikasi, informasi dan media massa;
4. Peningkatan Akses Masyarakat terhadap informasi;
5. Fasilitas untuk Peningkatan Hubungan Masyarakat yang memadai;
6. Pengelolaan Layanan Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat yang baik;
7. Terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang mengelola Layanan Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat.
8. Belum terintegrasinya aplikasi yang digunakan di masing – masing OPD.

Dengan memperhatikan faktor – faktor dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah maka dapat ditentukan isu – isu strategis sebagai berikut ;

1. Belum optimalnya pelayanan publik pemerintah daerah ;
2. Keterbukaan Informasi Publik ;
3. Menciptakan masyarakat pedesaan yang sadar dan melek dunia digital serta mampu menangkal berita hoax ;
4. Sistem Pemerintahan berbasis elektronik ;
5. Pengembangan dan Integrasi Aplikasi ;
6. Smart City ;
7. Masyarakat Digital Industri 4.0 ;
8. Government Chief Information Officer ;
9. Satu Data Indonesia ;
10. Transformasi fungsi persandian dalam menjamin keamanan *e-government* atau sistem pemerintahan berbasis elektronik dan mendukung pembentukan ekosistem kota pintar (*smart city*);
11. Isu Gender, untuk menunjukkan KESENJANGAN antara laki – laki, perempuan, anak – anak, dewasa dan yang berkebutuhan khusus yang diperoleh dengan membandingkan kondisi sebenarnya (KONDISI SUBYEKTIF) terhadap kondisi yg diharapkan (KONDISI NORMATIF).

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian

A. Tujuan

Tujuan menggambarkan implementasi dari pernyataan misi yang merupakan kondisi yang ingin dicapai sesuai yang diharapkan. Dengan demikian, tujuan merupakan kerangka dan arah prioritas program dan aktivitas organisasi yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

Sesuai Misi ke-3 yaitu : Meningkatkan etos kerja dan integritas aparatur pemerintahan guna memberikan pelayanan prima Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi menetapkan tujuan Strategis yaitu :

1. Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah;
2. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan.

Pemerintahan yang bersih dan baik atau disebut juga *good governance* merupakan satu hal mutlak yang harus dilakukan untuk mewujudkan tercapainya Visi Kabupaten Ngawi. Tata pemerintahan yang baik memiliki ciri antara lain : Akuntabilitas, Keterbukaan dan transparan, Ketaatan pada hukum, Komitmen kuat untuk bekerja demi kepentingan umum dan bukan pada kelompok atau pribadi, Komitmen untuk mengikutsertakan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap tahap-tahap pembangunan. Aparatur pemerintah yang profesional yaitu yang mendorong pola pengembangan karier yang menuju pada pengembangan profesionalisme, pengembangan standar kompetensi aparatur dan peningkatan kesejahteraan aparatur serta memberikan pelayanan publik yang baik dan memuaskan, penyampaian informasi kepada masyarakat yang benar dan akurat yang dapat dipertanggungjawabkan. Kesetaraan gender yang merupakan suatu kondisi dimana perempuan dan laki-laki

menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi pembangunan di segala bidang kehidupan, sehingga diperlukan keadilan gender yang merupakan suatu upaya untuk membuat kondisi adil untuk perempuan dan laki-laki melalui kebijakan dan kegiatan serta proses budaya yang menghilangkan hambatan-hambatan terhadap akses, peran, kontrol dan manfaat bagi perempuan dan laki-laki, pembangunan harus dapat memberikan manfaat yang sama bagi perempuan dan laki-laki.

B.Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang diformulasikan dalam bentuk rencana tindakan yang harus dilakukan dalam kurun waktu tertentu guna pencapaian tujuan dengan lebih menekankan pada pemanfaatan sumberdaya yang tersedia secara efektif dan efisien.

Sesuai tujuan meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana jaringan infrastruktur untuk pemenuhan komunikasi dan informatika di Kabupaten Ngawi serta meningkatkan pelayanan publik yang baik, bersih dan akuntabel serta peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah melalui peningkatan kinerja maka Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian menetapkan Sasaran Strategis yaitu :

1. Meningkatkan kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah, dengan indikator keberhasilan: Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah;
2. Meningkatkan implementasi e -government dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dengan indikator keberhasilan: Cakupan layanan telekomunikasi;
3. Mewujudkan sistem data yang terintegrasi secara sistematis, dengan indikator keberhasilan: Persentase sistem data statistik sektoral yang terintegrasi;
4. Meningkatkan keamanan informasi pemerintah daerah, dengan indikator keberhasilan: Indeks KAMI.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian dapat dilihat pada tabel T-C.25 berikut ini;

Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-						KET
				Tahun 1(2021)	Tahun 2(2022)	Tahun 3(2023)	Tahun 4(2024)	Tahun 5(2025)	Tahun 6(2026)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1.	Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah		Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	85.00	85.75	86.20	89.55	89.60	89.70	Menyesuaikan capaian nilai LHE AKIP tahun 2022
		Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	85.00	85.75	86.20	89.55	89.60	89.70	
2	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	-	Indeks SPBE	3	3	3.5	3.6	3.7	3.8	Penilaian SPBE terbaru sesuai PermenPAN RB No. 59 Tahun 2020
		Meningkatnya implementasi e -government dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Cakupan layanan telekomunikasi	75%	80%	80%	80%	90%	100%	
		Mewujudkan sistem data yang terintegrasi secara sistematis	Persentase sistem data statistik sektoral yang terintegrasi	55%	60%	65%	70%	75%	80%	
		Meningkatnya keamanan informasi pemerintah daerah	Persentase penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi	55%	60%	-	-	-	-	
			Indeks KAMI	-	-	300	301	415	415	

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan misi ke 3 (tiga) “Meningkatkan etos kerja dan integritas aparatur Pemerintahan guna memberikan pelayanan prima”, maka dilakukan berlandaskan 5 (lima) strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi ;
2. Meningkatkan pelayanan publik dalam rangka keterbukaan informasi publik melalui pemberdayaan lembaga komunikasi publik ;
3. Mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang didasari integrasi aplikasi dan integrasi data ;
4. Meningkatkan pemanfaatan data statistik sektoral yang akurat, akuntabel dan terpercaya dengan berpedoman pada kebijakan Satu Data Indonesia ;
5. Meningkatkan kesadaran keamanan informasi kepada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi.

Dari ke 5 (lima) strategi di atas menjadi rumusan untuk mencapai keberhasilan dari suatu program dan kegiatan yang berlandaskan dan berpedoman pada arah kebijakan sebagai berikut ;

1. Meningkatkan Kualitas Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi;
2. Pengembangan konsep pengelolaan komunikasi publik yang efektif dalam bentuk penyediaan informasi, penyebarluasan informasi dan pelayanan hubungan komunikasi;
3. Mengimplementasikan e – government / SPBE;
4. Mengoptimalkan Pemenuhan Ketersediaan Data Statistik Sektoral yang akurat, akuntabel dan terpercaya;
5. Standart Keamanan Informasi bagi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kab.Ngawi

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan menerapkan strategi dan arah kebijakan, maka Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi mengklasifikasi dan melakukan identifikasi faktor lingkungan internal dan eksternal sebagai berikut :

Faktor Internal			
No	Kekuatan (Strength)	No	Kelemahan (Weakness)
1.	Tersedianya Sumberdaya Manusiayang cukup	1.	Terbatasnya sumberdaya manusia yang trampil dan profesional
2.	Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan	2.	Kurangnya kemampuan memberdayakan potensi informasi dan komunikasi Masyarakat
3.	Tersedianya anggaran	3.	Belum adanya mekanisme SOP RuangKomando
4.	Tersedianya sarana prasarana yang memadai	4.	Belum optimalnya tata kelola Data Center
5.	Terbangunnya Smart City	5.	Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK
6.	Adanya regulasi bidang kominfo	6.	Belum optimalnya pengintergrasian sistem informasi dan data Perangkat Daerah
		7.	Ketersediaan Infrastruktur TIK yangbelum merata

Faktor Eksternal			
No	Peluang (Opportunities)	No	Ancaman (Threats)
1.	Komitmen Kepala Daerah mendukungpeningkatan TIK	1.	Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik
2.	Tersedianya perundangan yang mendasari regulasi bidang Kominfo	2.	Pesatnya perkembangan TIK
3.	Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik	3.	Semakin tingginya pemahaman masyarakat terhadap TIK
4.	Pengembangan dan Pemanfaatan Smart City oleh Perangkat Daerah	4.	Kurangnya Trust (kepercayaan) dari Perangkat Daerah terhadap

			pengembangan TIK
5.	Program Kemenkominfo Indonesia bebas sinyal 2020	5.	Semakin maraknya kejahatan siber
6.	Hubungan kerjasama yang baik dengan instansi vertikal guna peningkatan keamanan informasi	6.	Semakin tingginya informasi yang bersifat hoax di masyarakat
7.	Ketersediaan data statistik sektoral	7.	Data yang tidak akurat dan terpercayakarena tidak updating
8.	Kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi	8.	

Penentuan Strategi Pencapaian Indikator Sasaran

Faktor Eksternal	Peluang (Opportunities) :	Ancaman (Threats) :
	Faktor Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen Kepala Daerah mendukung peningkatan TIK 2. Tersedianya perundangan yang mendasari regulasi bidang Kominfo 3. Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik 4. Pengembangan dan Pemanfaatan Smart City oleh Perangkat Daerah 5. Program kemenkominfo Indonesia bebas sinyal 2020 6. Hubungan kerjasama yang baik dengan instansi vertikal guna peningkatan keamanan informasi 7. Tersedianya data statistik sektoral 8. Kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi

<p>Kekuatan (Strength) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang cukup 2. Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan 3. Tersedianya anggaran 4. Tersedianya sarana prasarana yang memadai 5. Terbangunnya smart City 6. Adanya regulasi bidang kominfo 	<p>Alternatif Strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi 2. Meningkatkan pelayanan publik dalam rangka keterbukaan informasi publik melalui pemberdayaan lembaga komunikasi publik 3. Mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang didasari integrasi aplikasi dan integrasi data 4. Meningkatkan pemanfaatan data statistik sektoral yang akurat, akuntabel dan terpercaya dengan berpedoman pada kebijakan Satu Data Indonesia 5. Meningkatkan kesadaran keamanan informasi kepada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi 	<p>Alternatif Strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kemampuan mengintegrasikan Sistem Informasi dalam mendukung pendayagunaan media informasi 2. Meningkatkan kemampuan mengintegrasikan Sistem Informasi dan Database dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik 3. Memberdayakan potensi komunikasi masyarakat melalui pendayagunaan media informasi 4. Meningkatkan diseminasi informasi melalui pendayagunaan media informasi untuk mengurangi kesenjangan informasi 5. Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan aplikasi TIK dalam rangka mengembangkan muatan e-government dan kualitas pelayanan publik 6. Memberdayakan potensi komunikasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Kelemahan (Weakness) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya sumberdaya manusia yang trampil dan profesional 2. Kurangnya kemampuan memberdayakan potensi informasi dan komunikasi masyarakat 3. Belum adanya mekanisme SOP Ruang Komando 4. Belum optimalnya tata kelola Data Center 5. Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK 6. Belum optimalnya pengintegrasian sistem informasi dan data Perangkat Daerah 	<p>Alternatif Strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan SDM dalam menghadapi Globalisasi informasi 2. Mengembangkan kapasitas SDM aparatur dan masyarakat dalam bidang Kominfo yang siap menghadapi globalisasi dan keterbukaan informasi 3. Meningkatkan kebutuhan SDM untuk mengurangi Kesenjangan informasi di masyarakat 4. Meningkatkan sarana prasarana guna menunjang kebutuhan Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik 5. Menyusun rencana induk Smart City 6. Meningkatkan kualitas SDM yang ada dengan Bimbingan teknis bidang statistik 	<p>Alternatif Strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan sistem Informasi dalam menghadapi globalisasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik 2. Meningkatkan pemberdayaan potensi dan lembaga komunikasi masyarakat dalam menghadapi globalisasi dan keterbukaan informasi 3. Meningkatkan kemampuan potensi informasi masyarakat untuk mengurangi kesenjangan informasi 4. Meningkatkan infrastruktur TIK yang menunjang kebutuhan integrasi sistem informasi dan database dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik 5. Meningkatkan pemberdayaan potensi informasi masyarakat dalam menghadapi globalisasi informasi 6. Pengembangan dan pemanfaatan Smart City
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rumusan alternatif strategi dalam rangka pencapaian pelayanan kinerja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian dalam rangka mendukung terwujudnya misi ke - 3 ; Meningkatkan etos kerja dan integritas aparatur Pemerintahan guna memberikan pelayanan prima adalah dengan beberapa alternatif strategi diantaranya ;

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya yang ada di Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi dalam rangka mendukung implementasi Reformasi Birokrasi;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi;
3. Meningkatkan pelayanan publik dalam rangka keterbukaan informasi publik melalui pemberdayaan lembaga komunikasi publik;
4. Mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang didasari integrasi aplikasi dan integrasi data;
5. Meningkatkan kesadaran keamanan informasi kepada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi.

Rumusan pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian tertuang dalam Tabel T-C.26 sebagai berikut;

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

A. Program dan Kegiatan

Program merupakan penjabaran rinci kebijakan yang menguraikan langkah-langkah yang perlu diambil dalam upaya mewujudkan dan melaksanakan strategi. Program-program yang dilaksanakan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ;
2. Program Informasi Komunikasi Publik ;
3. Program Aplikasi Informatika
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral ;
5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian meliputi :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
7. Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
8. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
9. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
10. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
11. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

B. Indikator Kinerja

Penetapan Indikator Kinerja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi bertujuan untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian tujuan sasaran Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi selama 5 (lima) tahun kedepan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi capaian indikator setiap tahunnya.

C. Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Kelompok sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi adalah PNS Kabupaten Ngawi, pemerintah dan masyarakat. Sedangkan pendanaan indikatif dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi, Rencana Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2021 – 2026 oleh Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi adalah sebagaimana pada tabel T-C-27 sebagaimana terlampir ;

Tabel T-C.27.

Kabupaten Ngawi

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Ngawi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
						Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Tahun-6 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah						
						Target	Rp	Target	Rp		Rp		Rp		Rp		Rp	Target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)					
Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah				Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	86.87	85.00		85.75		86.20		89.55		89.60		89.70		89.70						
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan				Indeks SPBE	2.98	3		3		3.5		3.6		3.7		3.8		3.8						
Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah				Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	86.87	85.00		85.75		86.20		89.55		89.60		89.70		89.70						
		X.XX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	100%	100%	6,151,243,241	100%	6,773,761,522.77	100%	6,761,881,742.80	100%	6,879,530,654.13	100%	7,080,738,322.46	100%	7,196,078,721.84	100%	40,843,234,205.00					
		X.XX.01.201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja OPD yang disusun tepat waktu	100%	100%	23,485,000	100%	53,653,000.00	100%	56,300,000.00	100%	56,910,380.00	100%	42,800,000.00	100%	45,000,000.00	100%	232,050,380.00					
		X.XX.01.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun	10 dok		12,445,000	11 dok	33,653,000.00	-		-		-		-		-		Diskominfo				
				Jumlah dokumen penganggaran PD yang disusun	4 dok		5 dok		4 dok	-		-		-		-		-						
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-		-	11 Dokumen		11,000,000	11 Dokumen		7,700,380.00	11 Dokumen		5,400,000.00	11 Dokumen		6,000,000.00	44 Dokumen		30,100,380.00
		X.XX.01.201.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-		-	1 Dokumen		2,500,000	1 Dokumen		7,000,000.00	1 Dokumen		4,000,000.00	1 Dokumen		4,500,000.00	4 Dokumen		18,000,000.00
		X.XX.01.201.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-		-	1 Dokumen		9,650,000	1 Dokumen		7,000,000.00	1 Dokumen		4,000,000.00	1 Dokumen		4,000,000.00	4 Dokumen		24,650,000.00
		X.XX.01.201.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-		-	2 Dokumen		9,650,000	2 Dokumen		7,000,000.00	2 Dokumen		4,000,000.00	2 Dokumen		4,000,000.00	8 Dokumen		24,650,000.00

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Tahun-6 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp		Rp		Rp		Rp		Rp	Target	Rp		
		X.XX.01.201.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	-	-	-	2 Dokumen	2,500,000	2 Dokumen	7,000,000.00	2 Dokumen	4,000,000.00	2 Dokumen	4,000,000.00	8 Dokumen	17,500,000.00			
		X.XX.01.201.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja PD yang disusun	4 laporan	4 laporan	11,040,000	6 laporan	20,000,000.00	-	21,000,000.00	-	21,210,000.00	-	21,400,000.00	-	22,500,000.00	117,150,000.00	Diskominfo		
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	6 laporan		6 laporan		6 laporan		6 laporan		34 laporan				
		X.XX.01.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	100%	100%	5,294,702,985	100%	5,536,492,013.77	100%	5,593,179,432.80	100%	5,649,182,718.63	100%	5,722,329,008.46	100%	5,781,322,219.84	100%	33,577,208,378.50		
		X.XX.01.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	14 dok	60 org	5,270,702,985	1561 kali	5,512,492,013.77		5,567,979,432.80		5,623,730,718.63		5,679,529,008.46		5,736,322,219.84	1561 kali	33,390,756,378.50	Diskominfo	
				Jumlah dokumen pengajuan gaji dan tunjangan ASN dan Non ASN yang disusun	26 dok	3 dok		26 dok			26 dok		26 dok		26 dok		26 dok	130 dok			
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	-	1,430 Orang/bulan		1,430 Orang/bulan		1,430 Orang/bulan		1,430 Orang/bulan		1,430 Orang/bulan	5,720 Orang/bulan			
		X.XX.01.202.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 laporan	1	10,000,000		10,000,000.00	-	10,500,000.00	-	10,605,000.00	-	21,400,000.00	-	22,500,000.00	-	85,005,000.00		
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	-	-	-	-	1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		5 laporan				
		X.XX.01.202.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan yang disusun	48 laporan	48	14,000,000	48 laporan	14,000,000.00	-	14,700,000.00	-	14,847,000.00	-	21,400,000.00	-	22,500,000.00	-	101,447,000.00		
				Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	2 laporan	2		2 laporan													
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-	-	-	1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		5 laporan				
		X.XX.01.204	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Capaian realisasi retribusi daerah terhadap target tahun berkenaan	100%	100%	15,000,000.00	100%	15,000,000.00	100%	15,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi daerah	12 dok	-	-	12 dok	15,000,000.00	12 dok	15,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	Diskominfo	
		X.XX.01.205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang terpenuhi administrasi kepegawaiannya dalam setahun	100%	100%	19,740,000	100%	51,830,200.00	100%	54,421,710.00	100%	44,309,890.50	100%	45,806,000.00	100%	48,095,000.00	100%	264,202,800.50		
		X.XX.01.205.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang dibeli/diadakan	-	-	19,740,000	360 meter	26,082,000.00	-	27,386,100.00	-	15,922,500.00	-	16,000,000.00	-	16,800,000.00	-	121,930,600.00	Diskominfo	
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	-	-	-	1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		4 paket				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Tahun-6 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp	Target	Rp		Rp		Rp		Rp		Rp	Target	Rp			
	Meningkatnya implementasi e - government dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			Cakupan layanan telekomunikasi	74%	75%		80.00%		80.00%		80.00%		90.00%		100.00%		100.00%				
		2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK / PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase (%) konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah, counter narasi negatif, hoax, dan informasi missleading terhadap pemerintah daerah yang didiseminasikan sesuai dengan strategi komunikasi	70%	75%	1,469,085,000	75%	3,124,999,800.00	75%	3,394,000,000.00	75%	3,402,291,150.00	80%	3,518,884,500.00	80%	3,700,291,600.00	80%	18,609,552,050.00			
		2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	100%		1,469,085,000	75%	3,124,999,800.00	80%	3,394,000,000.00	85%	3,402,291,150.00	90%	3,518,884,500.00	100%	3,700,291,600.00	100%	18,609,552,050.00			
				Persentase (%) Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan oleh Provinsi dan kab/kota sesuai amanat UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik	-			75%		77%		79%		81%		83%		83%				
				Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Tingkat Kecamatan	-			80%		85%		90%		95%		100%		100%				
		2.16.02.2.01.00 01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah kebijakan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik yang dilegalikan	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000.00	-	10,100,000.00	-	-	-	-	20,100,000.00	Diskominfo		
				Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	-	-	-	2 dokumen	-	-		
		2.16.02.2.01.00 02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti	100 aduan	-	173,510,000	80 aduan	208,211,800.00	85 aduan	231,372,600.00	50 aduan	232,941,000.00		235,270,500.00		257,640,000.00	245 aduan	1,338,945,900.00	Diskominfo		
				Jumlah peserta sosialisasi Kanal SP4N-LAPOR! Di tingkat desa dan Kecamatan	-	240 org	-	450 orang	250 orang	-	60 Orang	-	-	-	-	-	-	760 orang	-	-		
				Jumlah peserta admin SP4N-LAPOR!	-	2 dok	-	4 kali	48 orang	-	60 orang	-	-	-	-	-	-	1088 orang	-	-		
				Jumlah laporan hasil koordinasi pengaduan / aspirasi publik	-	-	-	4 laporan	4 laporan	-	1 laporan	-	-	-	-	-	-	10 Laporan	-	-		
				Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	-	-	-	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-		
				Jumlah fasilitasi Pengembangan SDM bagi admin SP4N-Lapor	-	-	-	-	4 kali	-	1 kali	-	-	-	-	-	-	5 kali	-	-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
						Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Tahun-6 (2026)				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp									
		2.16.02.2.01.00 23	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik										10 konten		10 konten		20 konten				
				Jumlah peserta bimtek pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik										50 orang		50 orang		100 orang				
		2.16.02.2.01.00 05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Persentase komunitas masyarakat / mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	-	80%	74,560,000	80%	463,260,000.00	-	486,423,000.00	-	510,744,150.00	-	515,852,000.00	-	541,644,600.00	-	2,592,483,750.00	Diskominfo		
				Jumlah komunitas masyarakat / mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	-	-		-		6 komunitas		6 komunitas						6 komunitas				
				Jumlah fasilitasi penyiaran media yang dilaksanakan	-	5 fasilitasi		5 kali		5 kali		5 kali						15 kali		-		
				Jumlah media komunikasi publik yang dikelola	-	-		10 media		10 media		10 media						30 media		-		
				Jumlah peralatan studio yang diadakan	-	-		4 unit		4 unit		4 unit						12 unit		-		
				Jumlah laporan hasil koordinasi pengelolaan media komunikasi publik	-	-		4 laporan		4 laporan		4 laporan						12 laporan		-		
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	-	-		-		1 dokumen		1 dokumen						2 dokumen		-		
		2.16.02.2.01.00 21	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah fasilitasi penyiaran media yang dilaksanakan										5 kali		5 kali		10 kali				
				Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis										7 media		7 media		14 media				
		2.16.02.2.01.00 06	Pelayanan Informasi Publik	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	-	70%	129,429,000	70%	350,000,000.00	-	220,000,000.00	-	240,000,000.00	-	240,000,000.00	-	250,000,000.00	-	1,429,429,000.00	Diskominfo		
				Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	-	-		-		4disemina si		4disemina si						4diseminas i		-		
				Jumlah Daftar Informasi Publik OPD yang dimutakhirkan	-	-		4 daftar		4 daftar		4 daftar						4 daftar		-		
				Jumlah Daftar Informasi Publik yang disosialisasikan	-	-		4 daftar		4 daftar		4 daftar						4 daftar		-		
				Jumlah Daftar Informasi Publik yang tersaji di halaman website PPID OPD	-	-		4 daftar		4 daftar		4 daftar						4 daftar		-		
				Jumlah peserta Bimtek untuk penguatan PPID di OPD,Kecamatan dan Desa	-	264 org		150 orang		150 orang		150 orang						450 orang		-		
				Jumlah layanan informasi terkait NTPD yang ditindaklanjuti	-	-		100%		100%								100%		-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Tahun-6 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp		Rp		Rp		Rp		Rp	Target	Rp		
				Jumlah laporan hasil koordinasi pelayanan informasi publik	-	-		12 laporan		12 laporan		4 laporan				2 laporan	-				
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	-	-		-		1 dokumen		1 dokumen				2 dokumen					
		2.16.02.2.01.00 17	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Daftar Informasi Publik yang tersaji di halaman website PPD OPD									4 daftar		4 daftar		4 daftar				
				Jumlah peserta Bimtek untuk penguatan PPD di OPD,Kecamatan dan Desa									60 orang		60 orang		120 orang				
				Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan									5 permohonan		5 permohonan		10 permohonan				
				Jumlah jenis sarana sosialisasi program prioritas(Stunting dll)									2 jenis		2 jenis		2 jenis				
		2.16.02.2.01.00 07	Layanan Hubungan Media	Jumlah produk penyebaran informasi bakhumas	-	-		38 produk		105,000,000.00		110,250,000.00		111,352,500.00		116,920,000.00		543,522,500.00	Diskominfo		
				Jumlah laporan hasil koordinasi pengelolaan layanan hubungan media	-	-		10 laporan				10 laporan		10 laporan		10 laporan		50 laporan	-		
				Jumlah Layanan Hubungan Media	-	-					10 layanan		10 layanan		10 layanan		40 layanan				
		2.16.02.2.01.00 08	Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	Persentase mitra strategis penda (media komunitas seperti KIM, dll) termasuk media lokal yang melaksanakan diseminasi informasi kebijakan dan program prioritas nasional dan prioritas daerah	-	100%	100,516,000	75%	125,000,000.00	-	131,250,000.00	-	137,812,500.00	-	144,703,000.00	-	151,938,000.00	-	791,219,500.00	Diskominfo	
				Jumlah kegiatan fasilitasi bagi mitra strategis penda (media komunitas seperti KIM, dll) termasuk media lokal yang melaksanakan diseminasi informasi kebijakan dan program prioritas nasional dan prioritas daerah	-	-		-			4 kegiatan		6 kegiatan				10 kegiatan				
				Jumlah peserta bimtek pemberdayaan Sumber Daya Kelompok Informasi Masyarakat	-	-		150 orang			150 orang		150 orang				450 orang	-			
				Jumlah laporan hasil koordinasi pengelolaan informasi publik	-	-		12 laporan			12 laporan		12 laporan				36 laporan	-			
				Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	-	-		-			1 dokumen		1 dokumen				2 dokumen				
		2.16.02.2.01.00 15	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo									17 komunitas		17 komunitas		17 komunitas				
		2.16.02.2.01.00 09	Manajemen Komunikasi Krisis	Persentase jumlah isu publik yang dipantau dan atau ditangani terkait komunikasi krisis	-	-		-		100,000,000.00	-	100,000,000.00	-	100,000,000.00	-	100,000,000.00	-	400,000,000.00			
				Jumlah peserta bimtek penguatan pengelolaan/ penanganan komunikasi krisis	-	-		-			120 orang		120 orang				240 orang	-			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Tahun-6 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp		Rp		Rp		Rp		Rp	Target	Rp		
				Jumlah media komunikasi yang digunakan sebagai sarana pengelolaan komunikasi krisis	-	-	-	-	4 media komunikasi		4 media komunikasi					4 media komunikasi					
				Jumlah Monev dan laporan terkait pengelolaan komunikasi krisis	-	-	-	-	4 laporan		4 laporan					8 laporan					
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	-	-	-	-	1 dokumen		1 dokumen					2 dokumen					
		2.16.02.2.01.00 20	Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik									100%		100%			100%			
				Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP									30 diseminasi		30 diseminasi			60 diseminasi			
				Jumlah media komunikasi yang digunakan sebagai sarana pengelolaan Diseminasi Informasi									3 media komunikasi		3 media komunikasi			3 media komunikasi			
		2.16.02.2.01.00 10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah publikasi melalui iklan layanan masyarakat	41	35 baliho	193,188,000	20 iklan	593,238,000.00	25 iklan	622,899,900.00	30 iklan	654,044,000.00		686,746,000.00		721,083,000.00	75 iklan	3,471,198,900.00	Diskominfo	
				Jumlah peserta bimtek penguatan sumber daya komunikasi publik	-	-	-	100 orang		100 orang		100 orang						300 orang	-		
				Jumlah sarana dan prasarana publikasi yang diadakan	-	-	-	8 unit		10 unit		12 unit						30 unit	-		
				Jumlah laporan hasil koordinasi penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik	-	-	-	4 laporan		4 laporan		4 laporan						12 laporan	-		
				Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang meningkat Kapasitasnya	-	-	-	-		5 orang		5 orang						10 orang	-		
		2.16.02.2.01.00 24	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan									50 orang		50 orang			100 orang			
				Jumlah publikasi melalui iklan layanan masyarakat									35 iklan		35 iklan			70 iklan			
		2.16.02.2.01.00 11	Penguatan tata kelola Komisi Informasi Daerah	Persentase penyelesaian sengketa informasi	-	-	-	-		47,500,000.00		45,875,000.00		49,733,500.00		59,220,000.00		202,328,500.00			
				Jumlah Monev dan laporan terkait Penguatan Komunikasi Informasi di Daerah	-	-	-	-		4 laporan		2 laporan						4 laporan	-		
				Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	-	-	-	-		1 dokumen		1 dokumen						2 dokumen	-		
				Jumlah peserta bimtek, sosialisasi, FGD terkait Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	-	-	-	-		50 orang		0 orang						100 orang	-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi				
						Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Tahun-6 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah							
						Target	Rp	Target	Rp		Rp		Rp		Rp		Rp	Target	Rp						
		2.16.02.2.01.00 16	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika																					
		2.16.02.2.01.00 12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah publikasi penyelenggaraan pemerintah daerah melalui media elektronik	2000	33 kali	797,882,000	5 media	1,205,290,000.00	5 media	1,365,554,500.00	5 media	1,272,424,500.00		1,336,045,000.00		1,402,847,000.00	15 media	7,380,043,000.00	Diskominfo					
				Jumlah publikasi penyelenggaraan pemerintah daerah melalui media cetak	-	23 kali		50 media		50 media		50 media						150 media	-						
				Jumlah media yang difasilitasi pemerintah daerah	-	-		38 media		38 media		38 media						114 media	-						
				Jumlah peserta Bimtek jurnalistik	-	-		100 orang		100 orang		100 orang						300 orang	-						
				Jumlah sarana dan prasarana jurnalistik yang diadakan	-	-		3 unit		3 unit		3 unit						9 unit	-						
				Jumlah laporan hasil koordinasi penyelenggaraan humas dan media	-	-		50 laporan		50 laporan		50 laporan						150 laporan	-						
				Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	-	-		-		1 dokumen		1 dokumen						2 dokumen							
		2.16.02.2.01.00 14	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media										1 laporan		1 laporan		2 laporan							
				Jumlah publikasi penyelenggaraan pemerintah daerah melalui media elektronik										5 media		5 media		10 media							
				Jumlah publikasi penyelenggaraan pemerintah daerah melalui media cetak										50 media		50 media		100 media							
				Jumlah media yang difasilitasi pemerintah daerah										38 media		38 media		76 media							
		2.16.02.2.01.00 13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-		5 unit		5 unit		5 unit		5 unit		20 unit							
		2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA/PROGR AM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase layanan e - government yang terintegrasi	65%	70%	2,832,374,000	70%	5,085,196,000.00	80%	5,384,900,797.00	85%	5,470,450,376.00	90%	5,558,160,500.00	100%	5,836,065,600.00	100%	30,167,147,273.00						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Tahun-6 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp		Rp		Rp		Rp		Rp	Target			Rp
		2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo			1,881,541,000	80%	2,443,150,000.00	85%	2,565,307,500.00	90%	2,643,074,376.00	95%	2,674,982,500.00	100%	2,808,731,000.00	100%	15,016,786,376.00		
				Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar				80%		85%		90%		95%		100%		100%			
		2.16.03.2.01.00 01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten / Kota	Persentase Usulan Domain Yang Berhasil Terealisasikan	-	100%	30,000,000	80%	150,000,000.00	-	157,500,000.00	-	165,375,000.00	-	167,012,500.00	-	175,363,000.00	-	845,250,500.00	Diskominfo	
				Jumlah laporan hasil koordinasi pendaftaran nama domain pemerintah daerah	-	-		4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		20 laporan	-		
				Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	-	-		-		5 domain		5 domain		5 domain		15 domain		30domain			
		2.16.03.2.01.00 02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015	47	80%	26,390,000	80%	150,000,000.00	-	157,500,000.00	-	165,375,000.00	-	167,012,500.00	-	175,363,000.00	-	841,640,500.00	Diskominfo	
				Jumlah kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015	-	-		-		90		95						185			
				Jumlah laporan hasil koordinasi penatalaksanaan nama domain pemerintah daerah				4 laporan		4 laporan		4 laporan						12 laporan	-		
				Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						3 dokumen		3 dokumen						6 dokumen			
		2.16.03.2.01.00 04	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa										1 dokumen		1 dokumen		2 dokumen			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Tahun-6 (2026)				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp								
		2.16.03.2.02.00 01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e- government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e- government	-	35,000,000	5 peratura n	200,000,000.00		210,000,000.00		220,500,000.00		222,705,000.00		233,840,000.00		1,122,045,000.00	Diskominfo		
				Rata - rata indeks domain kebijakan dan tata kelola SPBE	-	2.8	3.1		-		-	-	-	-	-	-	-	-			
				Nilai indeks domain kebijakan dan tata kelola SPBE	-	-	-		3.2		3.3							3.3			
				Jumlah laporan hasil koordinasi penatalaksanaan e - government	-	-	6 laporan		6 laporan		6 laporan							18 laporan	-		
				Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E -Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-		2 dokumen		2 dokumen							4 dokumen			
		2.16.03.2.02.00 15	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda									1 laporan		1 laporan		2 laporan				
				layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik									5 layanan		5 layanan		5 layanan				
				jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik									5 layanan		5 layanan		5 layanan				
		2.16.03.2.02.00 13	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional											1 aplikasi		1 aplikasi				
		2.16.03.2.02.00 02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase aspek dalam arsitektur SPBE Pemkab Ngawi yang didukung anggaran bidang TIK	-	60%	22,874,000	80%	300,000,000.00	-	315,000,000.00	-	330,750,000.00	-	334,057,500.00	-	350,760,000.00	-	1,653,441,500.00	Diskominfo	
				Jumlah aspek dalam arsitektur SPBE Pemkab Ngawi yang didukung anggaran bidang TIK	-	-	-		14 aspek												
				Jumlah laporan hasil koordinasi rencana induk dan anggaran SPBE	-	-	-		6 laporan		-										
				Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	-	-	-		1 dokumen		4 dokumen										
		2.16.03.2.02.00 19	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE									2 dokumen				2 dokumen				
		2.16.03.2.02.00 19	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE											2 dokumen		2 dokumen				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Tahun-6 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp		Rp		Rp		Rp		Rp	Target	Rp		
		2.16.03.2.02.00 22	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah									1 dokumen					1 dokumen			
		2.16.03.2.02.00 37	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur,peta rencana, proses bisnis,serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur,peta rencana, proses bisnis,serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah										1 dokumen				1 dokumen			
		2.16.03.2.02.00 03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	-	80%	329,759,000	80%	756,850,000.00	-	794,692,500.00	-	688,251,000.00	-	722,663,500.00	-	758,796,675.00	-	4,051,012,675.00	Diskominfo	
				Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	-	-		-		7 OPD		7 OPD		7 OPD		7 OPD		28 OPD			
				Jumlah sarana dan prasarana data center yang diadakan	-	1 data center		1 unit													
				Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	-	-				1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		4 Unit			
				Jumlah perangkat daerah pemilik layanan yang memanfaatkan pusat data	-	-		7 OPD		7 OPD		7 OPD		7 OPD		7 OPD		35 OPD			
				Jumlah laporan hasil koordinasi pengelolaan pusat data	-	-		5 laporan		5 laporan		5 laporan		5 laporan		5 laporan		25 laporan			
		2.16.03.2.02.00 16	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional									1 dokumen					1 dokumen			
				jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah									46 PD					46 PD			
				jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah									46 PD					46 PD			
		2.16.03.2.02.00 33	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali											1 laporan						
		2.16.03.2.02.00 04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah fasilitasi sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	-	-		20 fasilitasi	150,000,000.00	40 fasilitasi	157,500,000.00	60 fasilitasi	165,375,000.00	80 fasilitasi	167,028,500.00	80 fasilitasi	175,379,925.00	280 fasilitasi	815,283,425.00	Diskominfo	
				Jumlah laporan hasil koordinasi penyelenggaraan komunikasi intra pemerintah daerah	-	-		5 laporan		5 laporan		5 laporan		5 laporan		5 laporan		25 laporan			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Tahun-6 (2026)				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp		Rp		Rp		Rp		Rp			Target	Rp
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	-	-	-	-	1 dokumen	-	4 dokumen										
		2.16.03.2.02.00 24	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota									27 PD				27 PD				
				jumlah perangkat daerah yang saling terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh dinas kominfo									27 PD				27 PD				
				Jumlah PD yang memanfaatkan fasilitas sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringannya intra pemerintah									27 PD				27 PD				
		2.16.03.2.02.00 24	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota										27 PD			27 PD				
		2.16.03.2.02.00 06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Persentase perangkat daerah yang memperbaharuidatanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	-	75%	75%	100,000,000.00	-	105,000,000.00	-	110,250,000.00	-	111,352,500.00	-	116,920,000.00	-	543,522,500.00	Diskominfo		
				Persentase data yang dapat berbagi pakai	-	75%	75%		-		-		-		-		-	-			
				Jumlah data yang dapat berbagi pakai	-	-	-		22 jenis data		88 jenis data										
				Jumlah data dan informasi elektronik yang terintegrasi	-	-	4 sistem elektronik		20 sistem elektronik		-										
				Jumlah laporan hasil koordinasi integrasi pelayanan administrasi pemerintahan	-	-	4 laporan		20 laporan		-										
				Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	-	-	-		46 OPD												
		2.16.03.2.02.00 17	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah									46 PD				46 PD				
				jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis datanya									46 PD				46 PD				
				jumlah data yang dapat berbagi pakai									46 PD				46 PD				
		2.16.03.2.02.00 39	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah										1 dokumen			1 dokumen				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Tahun-6 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp	Target	Rp		Rp		Rp		Rp		Rp	Target			Rp	
		2.16.03.2.02.00 07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	-	80%	255,000,000	80%	350,000,000.00	-	367,500,000.00	-	385,875,000.00	-	389,734,000.00	-	409,220,000.00	-	2,157,329,000.00	Diskominfo		
				Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	-	-	-	-	13 OPD	-	-	13 OPD	-	-	13 OPD	-	-	13 OPD	-	-		
				Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	-	50%	-	50%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	22 sistem	-	-	22 sistem	-	-	22 sistem	-	-	22 sistem	-	-		
				Jumlah laporan hasil koordinasi pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik	-	-	-	4 laporan	4 laporan	-	-	4 laporan	-	-	4 laporan	-	-	4 laporan	-	-		
				Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	-	-	-	-	22 Unit	-	-	22 Unit	-	-	22 Unit	-	-	22 Unit	-	-		
		2.16.03.2.02.00 20	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah										2 aplikasi					2 aplikasi			
				jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan										55 sistem elektronik					55 sistem elektronik			
		2.16.03.2.02.00 32	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE															65 aplikasi			
		2.16.03.2.02.00 08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Persentase aplikasi yang terintegrasi	-	25%	98,000,000	25%	200,000,000.00	-	210,000,000.00	-	220,500,000.00	-	222,705,000.00	-	233,840,000.00	-	1,185,045,000.00	Diskominfo		
				Jumlah aplikasi yang terintegrasi	-	-	-	-	4 aplikasi	-	-	4 aplikasi	-	-	4 aplikasi	-	-	4 aplikasi	-	-		
				Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	-	50%	-	50%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	-	-	-	-	9 layanan	-	-	9 layanan	-	-	-	-	-	-	18 layanan	-	-	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Tahun-6 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp		Rp		Rp		Rp		Rp	Target	Rp		
				Persentase layanan administrasi pemerintahan (G2G) yang diimplementasikan	-	50%		50%		-		-					-				
				Jumlah layanan administrasi pemerintahan (G2G) yang diimplementasikan	-	-		-		14 layanan		14 layanan					28 layanan				
				Jumlah laporan hasil koordinasi penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintahan	-	-		3 laporan		3 laporan		3 laporan					6 laporan				
				Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	-	-		-		9 layanan		9 layanan					18 layanan				
		2.16.03.2.02.00 21	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah										5 aplikasi			5 aplikasi				
				jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah										5 dokumen			5 dokumen				
		2.16.03.2.02.00 34	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan informasi layanan	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah											5 aplikasi		5 aplikasi				
		2.16.03.2.02.00 25	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi, dan Portal Informasi											5 layanan		5 layanan				
		2.16.03.2.02.00 26	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo											1 dokumen		1 dokumen				
		2.16.03.2.02.00 09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/ Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Persentase capaian pilar Smart City yang dikelola dan dikembangkan	-	15%	150,000,000	15%	175,000,000.00	-	183,750,000.00	-	192,937,500.00	-	194,866,000.00	-	204,609,000.00	-	1,101,162,500.00	Diskominfo	
				Jumlah capaian pilar Smart City yang dikelola dan dikembangkan	-	-		-		2 capaian											
				Jumlah laporan hasil koordinasi pengembangan dan pengelolaan ekosistem Kabupaten / Kota Cerdas	-	-		6 laporan		6 laporan		6 laporan		6 laporan		6 laporan		30 laporan			
				Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	-	-		-		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		4 dokumen			
		2.16.03.2.02.00 23	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/ Kota Cerdas										27 unit			27 unit				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Tahun-6 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp		Rp		Rp		Rp		Rp	Target	Rp		
		2.16.03.2.02.00 38	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas												2 Dokumen	2 Dokumen				
		2.16.03.2.02.00 10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	-	60 %	35,000,000	60%	235,196,000.00	-	292,400,797.00	-	320,000,000.00	-	323,200,000.00	-	339,360,000.00	-	1,545,156,797.00	Diskominfo	
				Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	-	-		-		15 orang		20 orang		25 orang		30 orang		90 org			
				Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan literasi digital atau program pelatihan bidang digital yang difasilitasi oleh pemerintah daerah	-	100 orang		150 orang		200 orang		250 orang		300 orang		350 orang		1.350 org		-	
				Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan literasi digital atau program pelatihan bidang digital yang difasilitasi oleh pemerintah daerah	-	100 orang		150 orang		200 orang		250 orang		300 orang		350 orang		1.350 org		-	
				Jumlah laporan hasil koordinasi pengembangan dan pengelolaan sumber daya TIK pemerintah daerah	-	3 laporan		3 laporan		3 laporan		3 laporan		3 laporan		3 laporan		18 laporan		-	
				Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	-	-		-		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		4 dokumen			
		2.16.03.2.02.00 11	Pengelolaan <i>Government Chief Information Officer (GCIO)</i>	Jumlah koordinasi kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan TIK yang ditindaklanjuti	-	4 kali	25,200,000	4 kali	175,000,000.00	4 kali	183,750,000.00	4 kali	192,937,500.00	4 kali	194,866,000.00	4 kali	204,609,000.00	24 kali	976,362,500.00	Diskominfo	
				Jumlah laporan hasil koordinasi pengelolaan <i>Government Chief Information Officer (GCIO)</i>	-	4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		24 laporan		-	
				Jumlah Dokumen Pengelolaan <i>Government Chief Information Officer (GCIO)</i>	-	-		-		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		4 dokumen			
		2.16.03.2.02.00 28	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE											1 dokumen		1 dokumen				
		2.16.03.2.02.00 30	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas										46 PD			46 PD				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Tahun-6 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
						Target	Rp	Target	Rp		Rp		Rp		Rp		Rp	Target	Rp				
		2.16.03.2.02.00 36	Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas												46 PD		46 PD					
		2.16.03.2.02.00 12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	-	-	-	-	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		4 dokumen				
	Mewujudkan sistem data yang terintegrasi secara sistematis			Persentase sistem data statistik sektoral yang terintegrasi	53%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	80%	-					80%					
		2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	118,599,000	100%	584,522,000.00	100%	613,748,100.00	100%	644,435,225.00	100%	650,878,000.00	100%	683,421,450.00	100%	3,295,603,775.00	Diskominfo			
				Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%	100%		100%	203,074,000.00	100%	200,086,592.00	100%	372,557,805.00	100%	477,230,490.00	100%	401,024,500.00	100%	1,653,973,387.00				
		2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sistem data dan statistik yang terintegrasi	-	1 sistem	118,599,000	1 sistem	787,596,000.00	-	813,834,692.00	-	1,016,993,030.00	-	1,128,108,490.00	-	1,084,445,950.00	-	4,949,577,162.00				
				Persentase kelengkapan metadana kegiatan statistik sektoral	-	-	-	-	25%	50%	75%	100%					100%	100%					
				Persentase kelengkapan metadana indikator sektoral	-	-	-	-	25%	50%	75%	100%					100%	100%					
				Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	-	2 statistik sektoral	-	2 statistik sektoral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				Persentase survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	-	-	-	-	25%	50%	75%	100%					100%	100%					
		2.20.02.2.01.00 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah buku profil daerah yang digandakan	-	3 dok	118,599,000	20 buku	410,090,000.00		430,594,500.00		452,124,225.00		456,645,000.00		479,477,000.00	100 buku	2,347,529,725.00	Diskominfo			
				Jumlah Buku "kabupaten dalam angka" yang digandakan	-	-	-	50 buku															
				Jumlah Buku "PDRB" yang digandakan	-	-	-	20 buku															
				Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	-	60%	60%	60%															
				Proporsi rumah tangga dengan akses internet	-	60%	60%	60%															
				Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	-	60%	60%	60%															
				Jumlah laporan hasil koordinasi Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	-	4 laporan	4 laporan	4 laporan			4 laporan								18 laporan				
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	-	-	-	1 dokumen			1 dokumen								2 dokumen				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Tahun-6 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp	Target	Rp		Rp		Rp		Rp		Rp	Target	Rp			
		2.20.02.2.01.00 08	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan										100%				100%				
		2.20.02.2.01.00 17	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik											100%			100%				
		2.20.02.2.01.00 02	Peningkatan kapasitas SDM Pemdada dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah peserta Bimtek Peningkatan SDM Statistik Sektoral yang diselenggarakan	-	-	-	100 orang	174,432,000.00	100 orang	183,153,600.00	100 orang	192,311,000.00	100 orang	194,233,000.00	100 orang	203,944,450.00	400 orang	948,074,050.00	Diskominfo		
				Jumlah laporan hasil koordinasi Peningkatan kapasitas SDM Pemdada	-	-	-	2 laporan		10 laporan	-											
				Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	-	-	-	100 orang		500 orang												
		2.20.02.2.01.00 03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	-	60%	-	60%	84,432,000.00	-	88,653,600.00	-	93,085,000.00	-	100,348,000.00	-	105,365,500.00	-	471,884,100.00	Diskominfo		
				Persentase kelengkapan metadata indikator sektoral	-	60%	-	60%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Jumlah Metadata statistik sektoral yang dihimpun	-	-	-	3 metadata		3 metadata		3 metadata						9metadata	-			
				Jumlah laporan hasil koordinasi penyusunan metadata statistik sektoral	-	-	-	4 laporan		4 laporan		4 laporan						12 laporan	-			
				Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	-	-	-	-	1 Dokumen		1 Dokumen							2 Dokumen				
		2.20.02.2.01.00 18	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk											100%			100%				
		2.20.02.2.01.00 19	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.											75%			75%				
		2.20.02.2.01.00 04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah data pemerintah yang sudah terintegrasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,000,000.00	-	38,850,000.00	20 data	75,850,000.00	Diskominfo		
				Jumlah fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 kali	-			
				Jumlah laporan hasil koordinasi peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 laporan	-	4 laporan	-	8 laporan	-			
				Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47 orang	-	47 orang	-	94 orang	-			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Tahun-6 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
						Target	Rp	Target	Rp		Rp		Rp		Rp		Rp	Target	Rp				
		2.20.02.2.01.00 07	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik										27 orang				27 orang					
		2.20.02.2.01.00 20	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik											27 orang			27 orang					
		2.20.02.2.01.00 05	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah fasilitasi pengembangan infrastruktur	-	-				33,141,108.00			148,670,000.00			207,772,490.00		117,938,000.00			507,521,598.00	Diskominfo	
				Jumlah laporan hasil koordinasi Pengembangan infrastruktur	-	-				1 laporan			-	1 laporan		-	1 laporan		-	4 laporan			
				Jumlah Infrastruktur Statistik	-	-				1 unit			1 unit			1 unit		1 unit		4 unit			
		2.20.02.2.01.00 06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	-	-	3 kompilas i	118,642,000.00		78,291,884.00			130,802,805.00			132,110,000.00		138,871,000.00	3 kompilasi	598,717,689.00	Diskominfo		
				Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	-	-	3 survey												3 survey				
				Jumlah kajian dan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan	-	-	1 kajian												1 kajian				
				Jumlah laporan hasil koordinasi penyelenggaraan otorisasi statistik sektoral	-	-	1 laporan			1 laporan			1 laporan			1 laporan			4 laporan				
				Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	-	-	-			2 Dokumen			2 Dokumen			2 Dokumen			6 Dokumen				
		2.20.02.2.01.00 21	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral													100%		100%				
		2.20.02.2.01.00 22	Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah													1 laporan		1 laporan				
	Meningkatnya keamanan informasi pemerintah daerah			Persentase penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi	53%	55%		60%															
				Indeks KAMI	-	-				300			301			303		305		305			
		2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	65%	70%	45,638,000	70%	703,344,200.00	80%	725,119,531.00	85%	850,900,000.00	90%	870,261,000.00	100%	897,187,500.00	100%	4,092,450,231.00				
		2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat keamanan informasi pemerintah			45,638,000	60	603,344,200.00	-	620,119,531.00	-	740,650,000.00	-	758,908,500.00	-	780,267,500.00	-	3,548,927,731.00				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
						Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Tahun-6 (2026)				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp		Rp		Rp		Rp		Rp			Target	Rp	
				Persentase OPD yang diselenggarakan pengamanan sesuai standard					80%		85%		90%		100%		100%					
		2.21.02.2.01.00 01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah regulasi tentang Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang ditetapkan	-	-	1 regulasi	100,000,000.00	1 regulasi	105,000,000.00		110,250,000.00		111,352,500.00		100,334,500.00		526,937,000.00			Diskominfo	
				Jumlah laporan hasil koordinasi Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2 laporan		2 laporan		2 laporan		2 laporan		2 laporan		10 laporan		-			
				Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	-				1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		4 Dokumen					
		2.21.02.2.01.00 08	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian											1 dokumen		1 dokumen					
		2.21.02.2.01.00 02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lulusan peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan siber untuk K/L/D	-		3 orang	50,000,000.00	3 orang	52,500,000.00	3 orang	55,125,000.00	3 orang	55,676,000.00	3 orang	58,459,500.00	15 orang	271,760,500.00			Diskominfo	
				Jumlah lulusan sertifikasi yang mengikuti peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan sistem pemerintahan berbasis Elektronik (SPBE)	-		3 orang		3 orang		3 orang		3 orang		3 orang		15 orang		-			
				Jumlah peserta sosialisasi tentang proteksi keamanan informasi pemerintah daerah	-		100 orang		100 orang		50 orang		50 orang		50 orang		350 orang		-			
				Jumlah laporan hasil koordinasi penyelenggaraan proteksi keamanan informasi pemerintah daerah	-		4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		10 laporan		-			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Tahun-6 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp	Target	Rp		Rp		Rp		Rp		Rp	Target	Rp			
				Jumlah perangkat keamanan TIK khusus berupa peralatan sandi untuk Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-					2 unit		2 unit		2 unit		6 unit		12 unit				
				Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-					1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		4 Laporan				
			Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										4 laporan								
				Jumlah peserta sosialisasi tentang proteksi keamanan informasi pemerintah daerah										50 orang								
				Jumlah peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan siber untuk K/L/D										3 orang								
				Jumlah perangkat keamanan TIK khusus berupa peralatan sandi untuk Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										2 unit								
		2.21.02.2.01.00 06	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan												1 laporan		1 laporan				
		2.21.02.2.01.00 03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	-	100%	45,638,000	100%	303,344,200.00	-	305,119,531.00	-	303,975,000.00	-	307,015,000.00	-	322,365,500.00	-	1,587,457,231.00	Diskominfo		
				Jumlah kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal	-	-		-		5		5		5		15		80				
				Persentase system elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	-	100%		100%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Jumlah system elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian	-	-		-		108		108		108		108		108				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Tahun-6 (2026)				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp		Rp		Rp		Rp		Rp			Target	Rp
				Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	-	100%		100%		-		-		-		-		-			
				Jumlah sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	-	-		-		38		38		38		38		38		38	
				Jumlah laporan hasil Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	-	-		4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		20 laporan	
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	-	-		-		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		4 Laporan	
				Jumlah Assessment Layanan Keamanan Informasi untuk Perangkat Daerah	-	-		-		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		4 Laporan	
		2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik										1 laporan		1 laporan		2 laporan			
				Jumlah system elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian										55 sistem elektronik		55 sistem elektronik		55 sistem elektronik		55 sistem elektronik	
				Jumlah Assessment Layanan Keamanan Informasi untuk Perangkat Daerah										1 laporan		1 laporan		2 laporan			
		2.21.02.2.01.0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik												1 Laporan		1 Laporan			
		2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan keamanan informasi pemerintah daerah	-	-		1 layanan	150,000,000.00	1 layanan	157,500,000.00	1 layanan	271,300,000.00	1 layanan	284,865,000.00	1 layanan	299,108,000.00	1 layanan	1,162,773,000.00		Diskominfo
				Jumlah CSIRT yang dibentuk di sektor Pemerintah Daerah	-	-		-		1 CSIRT		1 CSIRT		1 CSIRT		1 CSIRT		1 CSIRT		1 CSIRT	
				Jumlah laporan hasil koordinasi penyelenggaraan layanan keamanan informasi pemerintah daerah	-	-		4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		20 laporan	
				Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	-	-		-		6 OPD		6 OPD		6 OPD		6 OPD		6 OPD		27 OPD	24 OPD
		2.21.02.2.01.0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian												46 PD		46 PD			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program,Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Tahun-6 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp		Rp		Rp		Rp		Rp	Target	Rp		
		2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	NA			80%	100,000,000.00	-	105,000,000.00	-	110,250,000.00	80%	111,352,500.00	100%	116,920,000.00	100%	543,522,500.00		
				Persentase OPD yang dilakukan pengamanan persandian berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan						82%		85%		90%		100%					
		2.21.02.2.02.00 01	Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaringan Komunikasi Sandi	-	-	-	100,000,000.00	6 OPD	105,000,000.00	6 OPD	110,250,000.00	6 OPD	111,352,500.00	6 OPD	116,920,000.00	27 OPD	543,522,500.00	Diskominfo		
				Jumlah Layanan Operasioalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-		1 layanan												
				Jumlah perangkat keamanan TIK dan infrastruktur komunikasi untuk Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-		4 unit		4 unit		4 unit		4 unit		8 unit				
				Pemeliharaan dan perbaikan peralatan sandi	-	-	-		8 unit												
				Jumlah laporan hasil koordinasi Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		-		
		2.21.02.2.02.00 02	Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.											1 kegiatan						
							10,616,939,241		16,474,897,522.77		17,079,736,762.80		17,620,165,210.13		18,156,152,812.46		18,714,069,371.84		98,661,960,921.00		
							10,616,939,241		16,474,897,522.77		17,079,736,762.80		17,620,165,210.13		18,156,152,812.46		18,714,069,371.84		98,661,960,921.00		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian merupakan perangkat daerah penyelenggara urusan wajib non pelayanan dasar yang meliputi urusan ; Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian. Indikator Kinerja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian pada RPJMD Kabupaten Ngawi yang mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Ngawi Tahun 2021 – 2026 diuraikan di Tabel T-C. 28 adalah sebagai berikut :

Tabel T-C.28.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	KET
		Tahun 0	Tahun 2021	Tahun 1 (2022)	Tahun 2 (2023)	Tahun 3 (2024)	Tahun 4 (2025)	Tahun 5 (2026)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	86.87	85.00	85.75	86.20	89.55	89.60	89.70	89.70	Menyesuaikan capaian nilai LHE AKIP tahun 2022
2	Cakupan layanan telekomunikasi	74%	75%	80%	80%	80%	90%	100%	100%	
3	Persentase sistem data statistik sektoral yang terintegrasi	53%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	80%	
4	Persentase penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi	53%	55%	60%	-	-	-	-	-	
	Indeks KAMI	-	-	-	300	301	303	415	415	

BAB VIII PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi Tahun 2021 – 2026 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian dalam melaksanakan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang komunikasi informatika, statistik dan persandian. Perubahan Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ngawi.

Dalam melaksanakan Perubahan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Perubahan Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai. Kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis 2021 – 2026 sebagai pedoman dalam pelaksanaan Rencana Kerja tiap tahun. Rencana tindak lanjut pelaksanaan program kegiatan mengacu pada rencana selama 5 tahun yang sudah ditargetkan dengan target utama implementasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dengan langkah - langkah sebagai berikut; pembangunan Satu Data Indonesia, menyusun Tata Kelola SPBE, menyusun kebijakan internal layanan manajemen perencanaan, penganggaran, keuangan dan kinerja, Menyusun kebijakan internal layanan pengadaan, menyusun kebijakan internal layanan pengaduan publik, rencana Induk SPBE

Akhir kata semoga Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi Tahun 2021 - 2026 yang disusun berdasarkan RPJMD Tahun 2021 – 2026 ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.

The stamp is circular with a blue border. Inside the border, the word "BUPATI" is written at the top and "NGAWI" at the bottom. In the center, there is a Garuda emblem. The name "ONY ANWAR HARSONO" is printed below the stamp.
BUPATI NGAWI
ONY ANWAR HARSONO